

info

DANA PENSIUN



EDISI 97
NOVEMBER - DESEMBER 2021

PROYEKSI EKONOMI 2022

● **Membaca**
Peluang Pasar
Obligasi

● **Marak IPO,**
Cermati Bursa
Saham



KECELAKAAN LALU LINTAS...?? LAPOR KEPOLISIAN,, SELANJUTNYA JASA RAHARJA YANG BEKERJA

**KAMI YANG
BEKERJA**



1

JASA RAHARJA MENERIMA LAPORAN POLISI
SECARA ONLINE DAN REALTIME VIA IRSMS POLRI

2

JASA RAHARJA MENGUNJUNGI RUMAH AHLI WARIS
UNTUK PENGURUSAN SANTUNAN MENINGGAL DUNIA

3

KERJASAMA JASA RAHARJA DENGAN RUMAH SAKIT
UNTUK PROSES PENJAMINAN KORBAN

4

JASA RAHARJA BERSINERGI DENGAN DUKCAPIL
UNTUK KEABSAHAN DATA AHLI WARIS KORBAN

5

PENYERAHAN SANTUNAN SECARA TRANSFER DAN
OVERBOOKING

DARI MANA SANTUNAN JASA RAHARJA ???

IURAN WAJIB



PENUMPANG MEMBELI
TIKET KENDARAAN
UMUM



DALAM SETIAP TIKET
TERDAPAT IURAN WAJIB
JASA RAHARJA



PERLINDUNGAN
PENUMPANG
KENDARAAN
UMUM

SUMBANGAN WAJIB



PEMILIK
KENDARAAN
MEMBAYAR
PAJAK KENDARAAN
DI SAMSAT



PEMBAYARAN PAJAK
TERMASUK SUMBANGAN
WAJIB DANA KECELAKAAN
LALU LINTAS JALAN
(SWDKLLJ)



PERLINDUNGAN TERHADAP
PIHAK KETIGA YANG
DIAKIBATKAN KECELAKAAN
KENDARAAN TERSEBUT

- SANTUNAN -

SANTUNAN BAGI AHLI WARIS KORBAN
LAKA LANTAS YANG MENINGGAL DUNIA

50JT

50JT

MAKSIMAL SANTUNAN DIBERIKAN BAGI
KORBAN MENDERITA CACAT TETAP

MAKSIMAL SANTUNAN BIAYA RAWATAN
BAGI KORBAN MENGALAMI LUKA - LUKA
(KHUSUS PESAWAT UDARA MAKS 25 JT)

20JT

4 JT

BIAYA PENGUBURAN BAGI KORBAN LAKA
MENINGGAL DUNIA TANPA AHLI WARIS

BANTUAN PERTOLONGAN PERTAMA
BAGI KORBAN LUKA - P3K (MAKSIMAL)

1 JT

**500
RIBU**

BANTUAN BIAYA AMBULANS BAGI
KORBAN LUKA - LUKA (MAKSIMAL)

REDAKSI

Penasihat:
Mudjiharno

Pemimpin Umum:
Suheri

Pemimpin Redaksi:
Arif Hartanto

Redaktur Pelaksana:
Aloy Tagawai

Sekretaris Redaksi:
Bambang Sri Mulyadi

Dewan Redaksi:
Eddy Pramana, Budi Ruseno,
Budi Sutrisno, Budi Sulistijo

Keuangan:
Heru AZ

Pemasangan Iklan:
Marissa

Fotografer:
Subandi

Sirkulasi/Distribusi:
Subandi

ALAMAT REDAKSI:

Wisma 46 - Kota BNI, Lantai 3 - Suite 3.05

Jl Jend. Sudirman Kav. 1

Jakarta 10220

Tlp: (021) 2514761, 2514762 Fax: (021) 2514760,

E-mail: adpupusat@adpi.or.id

PENERBIT:

PT JAGATMEDIA & BISNIS

Menyongsong Pemulihan Ekonomi 2022

Sinyal pemulihan ekonomi Indonesia mulai tampak menonjol menjelang akhir 2021. Hal itu ditandai dengan peningkatan ekspor yang signifikan, cadangan devisa terus naik, inflasi terkendali, dan investasi asing yang juga meningkat. Tidak berlebihan jika pemerintah mematok target pertumbuhan perekonomian Indonesia pada kisaran 5,2-5,8% pada 2022.

Prospek pemulihan ekonomi yang lebih kuat dan resilient, mendorong normalisasi pertumbuhan profitabilitas kalangan emiten di Bursa Efek Indonesia. Berbagai kondisi ini makin meyakinkan pelaku pasar tentang peluang investasi di pasar modal. Jumlah IPO saham sudah menembus 50 emiten, dengan nilai emisi baik saham, obligasi, maupun sukuk di pasar modal Indonesia

sudah menembus angka Rp 135 triliun.

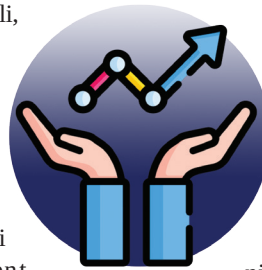
IPO saham pun diprediksi masih akan marak pada 2022. Saham berbasis teknologi akan cukup menonjol sebagai penggerak likuiditas transaksi.

Itu sebabnya ada optimisme indeks harga saham gabungan (IHSG) pada 2022 bisa mencapai level 7.600

Pasar surat utang pun akan tetap marak pada 2022 dengan emisi obligasi korporasi yang juga signifikan. Porsi cukup besar akan

digunakan untuk refinancing karena obligasi jatuh tempo selama 2022 berkisar Rp 143 triliun. Berbagai tema ini menjadi topik bahasan Info ADPI edisi ini, selain sejumlah artikel menarik lainnya. Selamat membaca.

Wasallam
Redaksi



DAFTAR ISI >>

UTAMA

MENYONGSONG PERTUMBUHAN EKONOMI 2022

4

AKTUAL

16 Fundamental Solid, Dukungan Kuat untuk Pasar Saham

Berbagai indikator makro akan menjadi katalisator kebangkitan pasar saham 2022. Dukungan juga datang dari IPO yang lebih marak, termasuk sejumlah nama besar dari kelompok BUMN. Sejumlah lembaga besar merekomendasikan beberapa saham yang dianggap potensial masuk portofolio pada 2022.

18 Membaca Arah Pasar Obligasi 2022

9

[KOLOM] Oleh: Budi Sutrisno

Peran Penting Majalah "Info Dana Pensiun" Bagi Industri Dapen

12

[KOLOM] Oleh: Arif Hartanto SH. MH

Dana Pensiun BUMN Jadi Ladang Korupsi?

20

[KOLOM] Oleh: Siti Rakhmawati

Reformasi & Transformasi Sistem Pensiun di Masa-Masa Sulit^(*)

24

[EKSPOSE] Oleh: Herna Gunawan

Dapen Telkom Peroleh Sertifikat SMAP

26

[EKSPOSE] Seputar Kegiatan ADPI

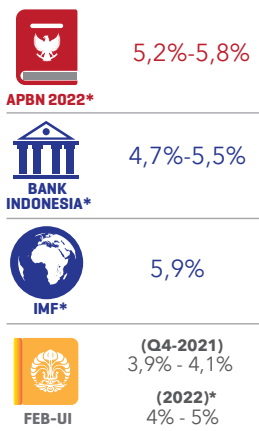
- Refreshment & Munas 2 Tahun 2021
- ADPI pindah kantor
- Refreshment Sertifikasi MUDP dan MRDP
- Partisipasi Dana Pensiun di HUT Ke-11 OJK Dalam Gambar



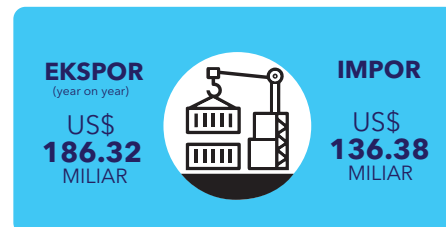
MENYONGSONG PERTUMBUHAN EKONOMI 2022

Sesuai rumusan APBN 2022, pemerintah telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran 5,2-5,8%. Sedikit lebih optimistis, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2022 sekitar 5,9%. Sejumlah lembaga lain pun punya keyakinan yang sama meski target yang ditetapkan sedikit di bawah pemerintah. Dasar keyakinan tidak lain karena komponen utama pembentukan pertumbuhan, yakni ekspor-impor, konsumsi rumah tangga, serta investasi, sedang dalam tren pertumbuhan sangat menggembirakan.

INDIKATOR EKONOMI INDONESIA



Ket: *Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2022 Menurut beberapa lembaga



Sesuai rumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022, pemerintah telah menetapkan target pertumbuhan PDB pada kisaran 5,2-5,8%. International Monetary Fund (IMF) bahkan lebih optimistis melihat peluang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 dengan mematok angka 5,9%. Walau sempat memangkas target pertumbuhan 2021 menjadi 3,2% dari sebelumnya 3,9%, IMF tetap pada pendiriannya soal peluang perbaikan ekonomi Indonesia pada 2022.

Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, target pertumbuhan PDB 2022 versi pemerintah masih tergolong realistis. Meski demikian, ia memberi catatan, target itu relatif bisa dicapai sejauh pemerintah mampu mengendalikan Covid-19 lewat akselerasi vaksinasi. “Jika kita mampu mengatasi pandemi di mana vaksinnya bisa dipercepat sampai dengan kuartal I di 2022, maka saya kira target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% itu bukan sesuatu yang berlebihan,” ujar Co-Founder CReco Research dalam acara webinar

bincang APBN 2022, Senin (18/10/2021).

Seperti halnya pemerintah, Bank Indonesia pun optimistis Indonesia bisa mencetak pertumbuhan lebih tinggi pada 2022 dibanding tahun 2021. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan, ekonomi Indonesia pada 2022 berpotensi tumbuh pada kisaran 4,7-5,5%.

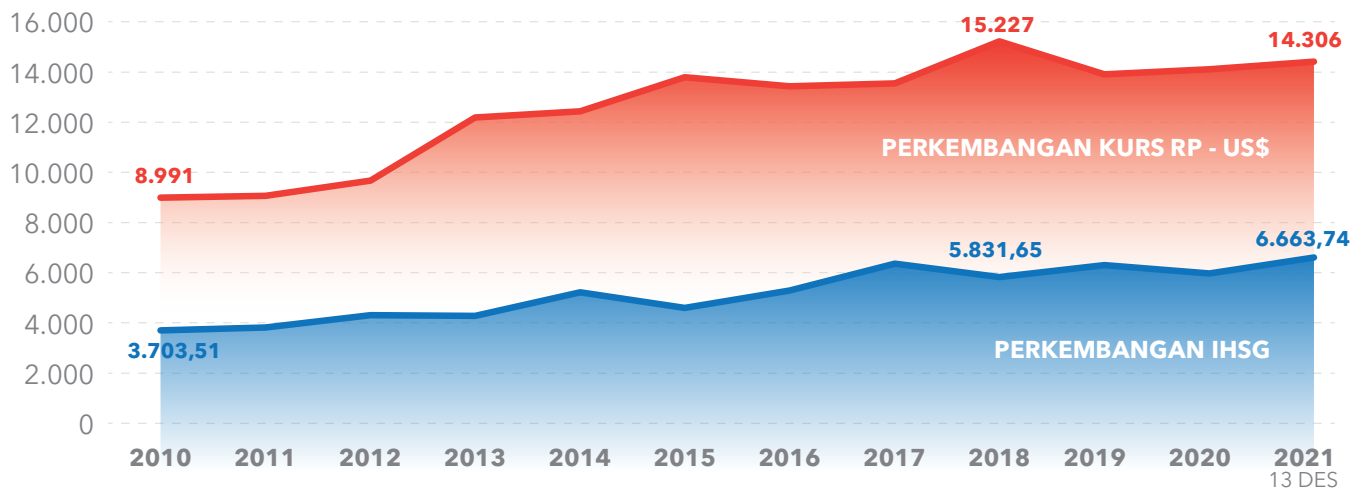
Berbicara pada acara Pertemuan Tahunan BI, Rabu (24/11/2021), Perry menandakan, sinergi dan koordinasi yang erat antar otoritas terkait akan memperkuat upaya pemulihan yang sudah dicanangkan. Sementara itu, upaya perbaikan perekonomian global akan ikut membantu pemulihan ekonomi Indonesia. Sebab jika ekonomi dunia membaik, Indonesia punya peluang untuk makin meningkatkan ekspor yang selama pandemi terus tumbuh signifikan. Selain itu, juga melihat aspek investasi dan kebijakan stimulus fiskal maupun moneter, serta pengendalian inflasi pada kisaran 2-4% akan menjadi komponen penting pertumbuhan pada 2022.

Koordinasi yang solid antara Kementerian bidang ekonomi, Bank Indonesia

(BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maupun Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang sudah terjalin baik selama ini, juga akan menjadi kekuatan penting Indonesia ke depan. BI berjanji untuk terus mendukung kebijakan pemerintah. Termasuk dengan mendukung dana penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) senilai Rp 321 triliun pada tahun 2022. BI akan berupaya menjaga suku bunga pada level yang bisa menopang dunia usaha. Sedangkan OJK akan tetap menerapkan kebijakan counter cyclical.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menandakan, selain koordinasi sangat bagus antar lembaga, sisi konsumsi masih akan menjadi kekuatan perekonomian Indonesia. Serentak dengan itu, UMKM yang pada awal pandemi Covid-19 sempat mengalami stagnasi, kini mulai pulih.

Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) mengklaim, sekitar 80% UMKM yang sempat terdampak krisis selama pandemi kini telah mulai pulih. Tentu saja ini berita menggembirakan, karena sekitar 64 juta UMKM Indonesia punya kontribusi pada PDB Indonesia sekitar



60%. Sedangkan penyerapan tenaga kerja pada kelompok UMKM bisa di atas 90%.

Tidak kalah menggembirakan, kalangan UMKM makin melek digital untuk mengoptimalkan penjualan. Kementerian BUMN melaporkan, berdasarkan platform Pasar Digital (PaDI) belanja kelompok BUMN saja kepada UMKM saat ini mencapai Rp 16,2 triliun. Nilai belanja sebesar itu berasal dari 210.627 transaksi yang melibatkan 12.785 pelaku UMKM. Nilai transaksi sebesar Rp 16,2 triliun, sebesar Rp 15,2 triliun berasal dari 160.153 transaksi yang melibatkan 9.874 pelaku UMKM melalui tender atau e-procurement. Sisanya, sekitar Rp 1 triliun berasal dari 50.474 transaksi melibatkan 2.911 pelaku UMKM melalui belanja langsung atau business to business (B2B). Tentu saja ini baru data sebagian UMKM yang kebetulan di bawah koordinasi kalangan BUMN.

Airlangga Hartarto mengatakan, pandemi telah menjadi berkah bagi dunia usaha Indonesia karena “memaksa” percepatan digitalisasi di berbagai sektor ekonomi. Neraca perdagangan Indonesia pun kian mengkilap seiring meningkatnya ekspor industri pengolahan. Sejalan dengan itu, neraca pembayaran Indonesia (NPI), maupun neraca transaksi berjalan terus surplus. Neraca perdagangan Indonesia selama Januari-Oktober 2021 mencapai US\$ 30,81 miliar.



PANDEMI TELAH MENJADI BERKAH BAGI DUNIA USAHA INDONESIA KARENA “MEMAKSA” PERCEPATAN DIGITALISASI DI BERBAGAI SEKTOR EKONOMI. KALANGAN UMKM MAKIN MELEK DIGITAL UNTUK MENGOPTIMALKAN PENJUALAN.”

“Selain kondisi pandemi Covid-19 bisa tertangani, pada saat yang sama beberapa indikator perekonomian mulai menunjukkan tanda-tanda positif, seperti PMI Manufaktur dan Indeks Keyakinan Konsumen sudah positif. Kami perkiraan di tahun ini (2021), Indonesia bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 4%, sehingga tahun depan kami optimistis bisa memacu di 5,2%,” ujar Airlangga, Senin (22/11/2021).

Airlangga menambahkan, saat ini seluruh komponen utama pembentuk produk domestik bruto (PDB) Indonesia dalam posisi positif. Komponen utama itu mencakup ekspor dan impor, konsumsi rumah tangga, serta investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada kuartal III-2021, pertumbuhan ekspor Indonesia mencapai 29,16%, impor 30,11%, investasi naik 3,74%, konsumsi rumah tangga tumbuh

1,03%, dan konsumsi pemerintah naik 0,66%.

Surplus neraca perdagangan, menurut Airlangga, kini diperkuat lonjakan harga komoditas. Data BPS menunjukkan, surplus neraca perdagangan Januari-Oktober 2021 mencapai US\$ 30,81 miliar. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Oktober 2021 mencapai US\$ 145,5 miliar. Angka ini setara dengan pembiayaan impor selama 8,5 bulan atau 8,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Nilai cadangan devisa sebesar itu bahkan berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Untuk mendukung peluang pertumbuhan ekonomi 2022, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyiapkan sejumlah langkah terintegrasi. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, agenda reformasi yang terintegrasi menjadi penekanan utama. Reformasi terintegrasi jangka pendek bertujuan mencapai target pemulihan ekonomi. Sedangkan reformasi jangka panjang bertujuan mewujudkan perekonomian yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Kementerian Keuangan menargetkan, defisit APBN 2022 pada kisaran 4,85% terhadap produk domestik bruto (PDB). Selanjutnya, pada 2023 defisit APBN akan ditekan maksimal 3% dari PDB. “Terkait agenda reformasi, pertama-tama dari sisi reformasi fiskal, pemerintah berkomitmen untuk mengem-

balikan defisit anggaran tidak lebih dari 3% terhadap PDB pada 2023. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang 2 Tahun 2020. Kami akan menurunkan defisit kita, menjaga konsolidasi fiskal,” ujar Suahasil.

FAKTOR PENGGERAK

Berbagai kebijakan yang diusung pemerintah akan memberi dukungan pada momentum ekspansi ekonomi yang tengah merebak di berbagai sektor. Pada sektor UMKM misalnya, setelah menikmati kebijakan relaksasi yang diusung Otoritas Jasa Keuangan, mulai memperlihatkan indikasi pemulihan signifikan. Direktur Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Supari mengatakan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sudah mulai mengalami pemulihan.

Berdasarkan laporan publikasi BRI, hingga kuartal III-2021, tercatat kredit UMKM tumbuh 12,5% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp 848,6 triliun. Merespons tren positif ini, BRI mengubah bisnis modelnya dengan mengedepankan pemberdayaan UMKM. Hal ini sejalan dengan permin-



Airlangga Hartarto.

taan kredit kelompok UMKM sudah lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi Covid-19. Tren ini, bagi BRI, mengindikasikan upaya pengendalian Covid-19 sudah mulai memberi hasil.

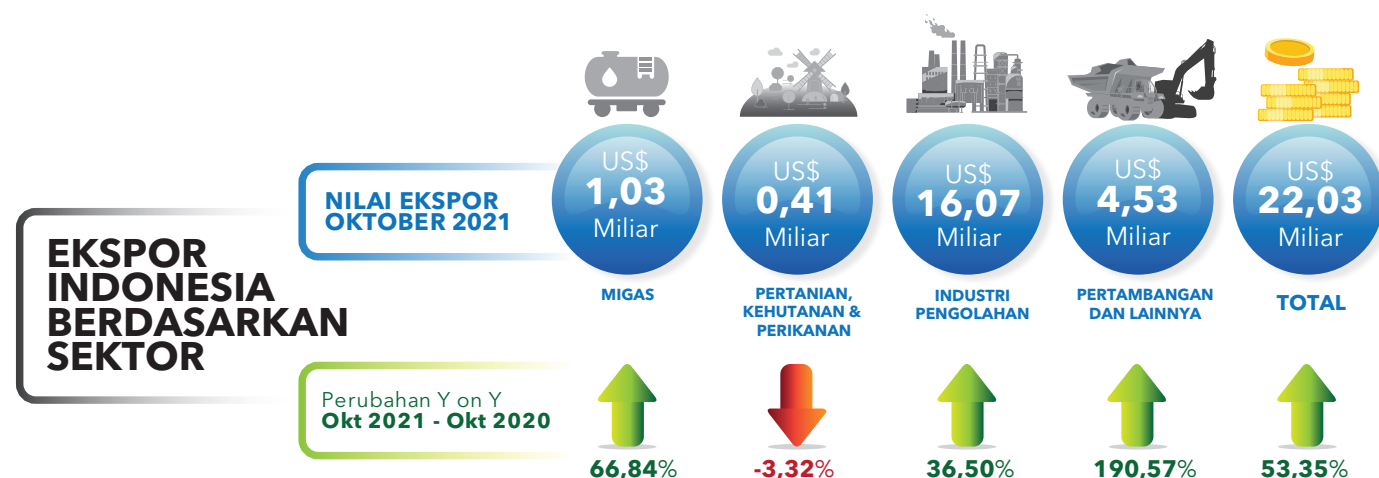
Sampai dengan September 2021, porsi kredit UMKM berkisar 67,4% dari total kredit UMKM nasional. Menurut Supari, dalam kurun waktu sekitar 5 bulan sampai dengan November 2021, kredit usaha mikro dan kecil BRI masih meningkat. Bahkan

posisinya sudah di atas sebelum Covid-19. “Angka pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa para pelaku UMKM telah recovery,” ujar Supari.

Komisaris Independen PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Raden Pardede mengatakan, kinerja perbankan sudah masuk titik balik (turning point). Hal itu tergambar pada pertumbuhan kredit yang terus mengalami kenaikan. Sejalan dengan itu, risiko kredit (loan at risk/LaR) perbankan juga terus menurun secara gradual. “Kita sudah turning point, kredit sudah naik, di saat yang sama kita tahu dari sisi LaR juga turning

point, sempat puncaknya 24,7% dan data September sudah 22,3% Oktober juga turun. Artinya perusahaan mulai mampu membayar sebagian dari kewajibannya,” tukas Raden Pardede, Selasa (23/11).

Faktor investasi terbukti telah menjadi komponen penting penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menargetkan realisasi investasi tahun



2022 sekitar Rp1.200 triliun. Dengan demikian ada kenaikan dari target 2021 sebesar Rp 900 triliun

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mengatakan, target tersebut dijalankan dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,4% sampai 6% pada 2022. “Rp 1.200 triliun ini salah satu syarat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5%. Memang ini bukan pekerjaan gampang karena harus naik 22% sampai 33%, dan ini harus dilakukan kerja yang luar biasa masif,” tegas Bahlil, Selasa (23/11/2021).

Bercermin pada pengalaman selama tahun 2021, termasuk upaya keras pemerintah mendorong hilirisasi industri, Bahlil yakin target investasi tahun 2022 bisa tercapai. Untuk memastikan hal itu, Bahlil mengatakan, pihaknya mengusung lima langkah strategis agar para investor bisa menjalankan target investasi yang telah dicanangkan.

Komponen ekspor terbukti telah menjadi faktor penggerak sangat penting bagi perekonomian dalam dua tahun terakhir. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasmita mengatakan, selama Januari-September 2021, pertumbuhan sektor industri mencapai 4,2%. Pada kurun waktu tersebut, kontribusi ekspor dari industri pengolahan nonmigas terhadap PDB sebesar 17,33%, sekaligus tertinggi dibanding sektor lain.

Selama Januari-September 2021, nilai investasi ke industri, terutama manufaktur mencapai Rp 236,79 triliun. Sejalan dengan peningkatan investasi, kontribusi ekspor sektor industri yang terus meningkat. Sampai dengan kuartal ketiga 2021, kontribusi ekspor sektor industri mencapai porsi 75% dari total ekspor nasional, naik dari periode sebelumnya sekitar 70%.

Di tengah himpitan pandemi Covid-19, menurut Agus, kontribusi ekspor sektor industri manufaktur pada 2020 mencapai US\$ 131,1 miliar. Nilai ekspor sebesar itu merepresentasikan



Perry Warjiyo



Raden Pardede

80,3% dari ekspor nasional selama 2020. Selanjutnya, selama Januari-Oktober 2021, kontribusi sektor industri terhadap total ekspor nasional mencapai 77,16%. Dari sisi nilai setara US\$143,76 miliar, dibanding total ekspor nasional sebesar US\$ 186,31 miliar.

ANTISIPASI TANTANGAN

Walau peluang pertumbuhan terbuka lebar, ekonom dari Fakultas Ekonomi UI, Telisa Aulia Falianty mengatakan, walau peluang pertumbuhan terbuka lepas, Indonesia perlu mengantisipasi sejumlah risiko. Telisa menyebut, berbagai tantangan tersebut mencakup risiko stagflasi, risiko tapering off dan efek spillover Evergrande, risiko commodity supercycle, tuntutan pengembangan ekonomi hijau, ketegangan geopolitik, maupun ancaman varian baru Covid-19.

Airlangga Hartarto mengatakan, pandemi Covid-19 masih menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah pun telah menyiapkan kebijakan kesehatan dan ekonomi yang seimbang untuk mengatasi situasi ini. Pemerintah dan otoritas terkait lain juga mengantisipasi kebijakan tapering off oleh The Fed. Bank Sentral AS disebut akan menurunkan bertahap pembelian obligasi pemerintah masing-masing US\$ 10 miliar untuk obligasi pemerintah dan US\$ 5 miliar untuk aset beragun kredit properti (mortgage-backed securities), hingga Juni 2022.

Namun Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa menyarankan pemerintah tidak perlu terlalu khawatir langkah The Fed. Alasannya, kebijakan fiskal dan moneter pemerintah cukup suportif dan akomodatif terhadap kebijakan Amerika. Menurut dia, The Fed bahkan telah menyatakan akan melakukan tapering dan pasar sudah merespons dengan baik.

Oleh karena itu, lanjut Purbaya, efek tantrum secara global tidak akan seburuk tahun 2013. “The Fed dalam menaikkan bunga bukan untuk membawa ekonomi ke masa resesi. Tetapi, itu akan mengendalikan pertumbuhan ekonomi supaya ekonomi Amerika Serikat tidak kepanasan, sehingga bisa tumbuh dalam waktu yang lama dengan level yang sesuai dengan tingkat ekonominya,” tutup Purbaya. □



Oleh: **Budi Sutrisno**
[Dirut Dapen BCA]

PERAN PENTING MAJALAH “INFO DANA PENSIUN” BAGI INDUSTRI DAPEN

Selama ini, kita mengenal majalah Info Dana Pensiun, merupakan majalah yang terbit untuk kalangan anggota ADPI sebagai **sarana informasi bagi para anggota**. Isinya seputar kegiatan ADPI dan informasi terkait kondisi terakhir industri Dapen serta artikel-artikel keuangan terkait dana pensiun.

Majalah terbit 2 (dua) bulan dan dicetak secara terbatas hanya untuk anggota ADPI, dan tidak terasa bila artikel ini dimuat, kita telah menikmati edisi ke 97, yaitu edisi bulan November – Desember 2021.

Pertanyaannya adalah “apakah kita sebagai anggota ADPI sudah merasakan manfaat yang baik dari penerbitan majalah ini, dan apakah majalah ini sudah berkembang isi dan bobotnya dibandingkan dengan edisi-edisi awal, serta apakah konsistensi penerbitan sudah lebih baik, sehingga kita selalu menantikan terbitnya edisi baru?”. Pembaca dapat menjawab pertanyaan tersebut disesuaikan dengan penafsiran dan penilaian yang bebas, dan semoga jawabannya sesuai dengan harapan Redaktur majalah ini.

Sebetulnya Redaksi majalah ini sudah diisi oleh personil yang dibekali dengan semangat dan keinginan memajukan industri Dapen bagi para anggota ADPI sehingga bukan saja diharapkan sebagai informasi bagi anggota sendiri, tapi juga sebagai sarana informasi bagi semua pi-

hak yang ingin mendapatkan informasi terkait industri dana pensiun.

Kepengurusan baru ADPI masa bhakti tahun 2021 – 2025 di bawah pimpinan Bapak Suheri memberikan kembali suntikan semangat baru untuk mengembangkan peran serta majalah Info Dana Pensiun bagi para anggotanya.

Dalam Rencana Kerja DPP ADPI yang baru, peranan majalah ini diharapkan semakin besar bagi DPP untuk menyukseskan program kerjanya, apa saja yang diharapkan dan diinginkan dari kepemimpinan ADPI yang baru terhadap majalah ini akan kita coba jabarkan lebih lanjut agar pembaca bisa mengetahui dan ikut berperan serta mewujudkan harapan tersebut.

Bila kita melihat dan membaca Rencana Kerja DPP tahun 2022 yang baru disahkan dalam Munas ADPI di Bali bulan November yang lalu, ada 2 bidang yang menggaris bawahi dan mengkaitkan Majalah ini dalam menunjang Rencana Kerjanya yaitu:

- Bidang Kemitraan dan Kepesertaan, berharap dalam rencana kerjanya, majalah Info Dana Pensiun dapat digunakan sebagai sarana komunikasi mengenai informasi up to date baik itu peraturan dan peristiwa yang terjadi di lingkup industri, maupun

berbagi pengalaman & transfer knowledge antar sesama anggota terhadap penerapan program-program baru yang sedang dijalankan sehingga proses pembelajaran ini dapat diketahui dan dimengerti oleh Dapen lainnya.

Selain itu, diharapkan peristiwa-peristiwa penting ADPI dilaporkan dan disebarkan kepada anggota lewat majalah ini.

- Bidang Hubungan Kelembagaan, Regulasi, dan Sosialisasi, berharap agar sebaran majalah ini dapat diperluas bukan hanya untuk Anggota ADPI tetapi juga ke mitra kerja yang belum mempunyai Dapen, sehingga diharapkan industri ini dapat berkembang dan dapat menjaring anggota baru, dapat juga menjadi sarana Promosi bagi perusahaan mitra kerja.

Harapan besar yang sudah dipercayakan pada majalah Info Dana Pensiun ini, telah ditangkap dan dikembangkan oleh redaksi dengan melakukan peningkatan kualitas tulisan, konsistensi penerbitan dan percepatan distribusi majalah ini agar sesuai dengan harapan para pembacanya, tentunya usaha-usaha baik yang telah dilakukan tetap harus



INFO DANA PENSIUN MELIBATKAN TENAGA PROFESIONAL JURNALISTIK, PAKAR AHLI, NARASUMBER YANG DIPERCAYA DAN PENULIS INTERNAL YANG SUDAH MELEWATI SARINGAN YANG CUKUP BAIK UNTUK DISAJIKAN DALAM SETIAP EDISINYA.



info DANA PENSIUN

PENERBITAL AWAL

KONDISI >>

- ❑ Masih awal, Konsumsi terbatas
- ❑ Distribusi terbatas

Q [QUESTION]

- Majalah itu untuk siapa & tentang apa?

A [ANSWER]

- Kalangan Anggota ADPI
- Isi: Seputar kegiatan ADPI dan kondisi terakhir industri Dapen

Munas Tahunan II / 2021 Rencana Kerja & Anggaran Perkumpulan ADPI Tahun 2022



EDISI 97

SEMANGAT BARU >>

- ❑ Ide Baru
- ❑ Konsumsi semua kalangan yang 'kepo' tentang Dapen
- ❑ Distribusi tanpa batas : e-magazine

Q [QUESTION]

- Apakah kita sebagai anggota ADPI merasakan manfaat yang baik dari penerbitan majalah ini?
- Apakah majalah ini berkembang isi dan bobot dibandingkan dengan edisi awal?

A [ANSWER]

- Pasti *dong*, baik tampilan maupun isi *getting better*

secara terus menerus ditingkatkan dari waktu ke waktu.

MAJALAH INFO DANA PENSIUN

Bila kita bedah isi dari Info Dana Pensiun pada setiap edisinya, sudah banyak mengalami perbaikan dan peningkatan isi tulisan, bukan hanya sekedar sebagai majalah internal ADPI saja tetapi sudah menyertakan berita-berita ekonomi Nasional baik pasar uang dan pasar saham pada kolom AKTUAL. Dan pada setiap penerbitan, Redaksi memilih tema Majalah yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi ekonomi yang terjadi baik di dalam negeri maupun luar negeri, tentunya terkait dengan industri dana pensiun dan ditempatkan dalam berita UTAMA.

Kemudian juga dalam KOLOM biasanya berisi tulisan baik internal dan

eksternal anggota ADPI yang menulis tentang ulasan, sharing pengalaman, dan permasalahan terkait industri Dana Pensiun.

Selain itu juga ada Laporan Khusus yang menulis special event atau tentang PROFIL yang ingin diulas, di samping itu ada PERISTIWA dan EKSPOSE yang berisi tentang kegiatan DPP dan Komda ADPI yang terjadi dalam rentang bulan edisi majalah.

Dalam penulisan artikelnya, Info Dana Pensiun melibatkan tenaga profesional jurnalistik, pakar ahli, narasumber yang dipercaya dan penulis internal yang sudah melewati saringan yang cukup baik untuk disajikan dalam setiap edisinya. Sedangkan untuk Redaktur Pelaksana diisi oleh tenaga profesional dan dibantu oleh design grafis yang mumpuni yang biasa melakukan design

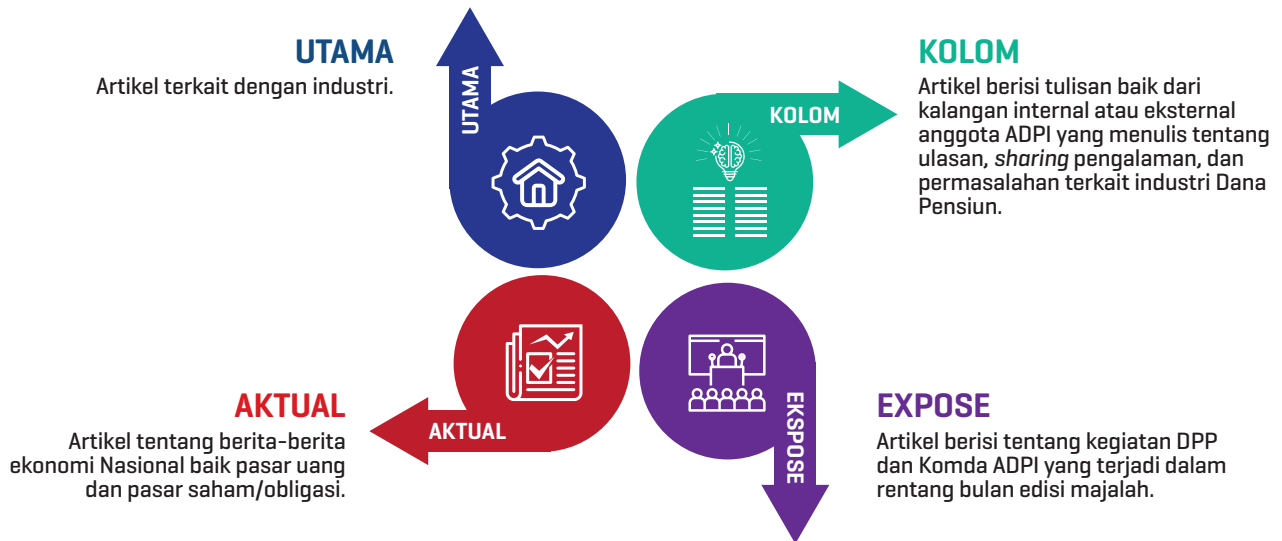
dan membuat majalah komersial.

Dalam setiap penerbitannya, para Redaksi majalah ini bertemu dalam rapat Redaksi yang dihadiri lengkap untuk menentukan topik utama dan materi tulisan yang ada dan disesuaikan dengan kondisi industri Dana Pensiun pada saat itu. Biasanya Pemimpin Redaksi akan menentukan isi tema majalah setelah berdiskusi dengan Redaksi Pelaksana untuk menentukan date line materi dan tanggal penerbitan.

TANTANGAN KE DEPAN

Dengan dimasukkannya majalah Info Dana Pensiun sebagai mitra kerja bagi 2 (dua) Bidang di DPP ADPI, maka ini menjadi tantangan bagi Redaksi untuk dapat mewujudkan hal tersebut sehingga majalah ini benar-benar dapat dijadikan

info DANA PENSIUN DAFTAR ISI



sarana komunikasi aktif bagi seluruh pelaku industri Dana Pensiun.

Peningkatan mutu tulisan dan pemilihan topik pada setiap edisinya diharapkan lebih baik dan teliti sehingga makna tulisan bisa ditangkap dengan jelas oleh pembacanya. Penulisan topik Utama dan Aktual harus diperhatikan Narasumber dan Penulis yang profesional dan mengerti betul apa yang ditulis dan sesuai situasi dan kondisi di pasar ekonomi dan bisnis.

Pada rubrik Kolom sebaiknya diperbanyak dengan berbagi pengalaman dan pemilihan permasalahan operasional Dana Pensiun, dikaitkan dengan peraturan yang ada dan mitigasi serta tindak lanjut yang akan dilakukan bila ada permasalahan di sana.

Sebetulnya Kolom ini dapat dijadikan tempat edukasi bagi Penulis yang ingin berbagi pengalaman dan pengetahuan di Dapen nya sehingga semua Dapen lain bisa mendapat informasi yang jelas, juga bagi para pengurus Dapen yang ingin belajar menulis artikel, maka rubrik ini sangat cocok, karena akan dilakukan pembimbingan dan review oleh redaksi sebelum artikelnya diterbitkan.

Selama ini pencetakan majalah dila-

kukan dengan jumlah eksemplar tertentu dan dikirim lewat dokumen kepada Dapen anggota ADPI, pada umumnya setiap Dapen akan menerima lebih dari 1 majalah dengan harapan agar majalah ini dapat diberikan dan dibaca selain oleh Pengurus dan Staf, juga diharapkan akan dibaca oleh Dewan Pengawas dan Pendiri masing-masing Dapen.

Dewan Pengawas dan Pendiri diharapkan bisa ikut membaca majalah ini agar segala informasi, masalah dan pengalaman di industri Dapen dapat dipahami dan dimengerti, sehingga komunikasi akan semakin baik antara Pengurus dan Dewas serta Pendiri karena mereka sudah ter-update informasinya dari majalah ini.

PENUTUP

Menyikapi perubahan era dalam Industri saat ini dimana DIGITALISASI menjadi suatu yang penting dan terbaru maka mau tidak mau kita juga harus mengikutinya, karena digitalisasi membawa manfaat yang baik buat lingkungan dan kecepatan informasi. Menyikapi hal tersebut Redaksi majalah Info Dana Pensiun mulai penerbitan edisi ke 96 selain mendistribusikan majalah dengan

cetakan, juga memberikan file/softcopy kepada setiap Dapen dan diharapkan Dapen tersebut dapat meneruskan kepada anggotanya lewat upload kedalam website masing masing Dapen.

Banyak sekali manfaat bila majalah ini di muat dalam website Dapen sehingga semua pihak yang membuka website Dapen tersebut dapat membaca sepuasnya majalah ini dan tidak dibatasi oleh waktu. Bagi pihak ketiga informasi industri Dapen juga akan semakin mudah didapatkan dengan e-magazine ini.

Akhir kata penulis berharap industri Dana Pensiun di Indonesia akan bisa berkembang bila kita para insan di dalamnya turut serta berperan dan bertanggung jawab untuk kemajuan industri ini.

Penggunaan majalah Info Dana Pensiun sebagai sarana komunikasi, pembelajaran, berbagi pengalaman, di antara insan Dana Pensiun dan Para Mitra kerjanya maka diharapkan Dapen akan tetap tumbuh dan memberikan kontribusi yang besar bagi para anggotanya dan juga bagi negara kita tercinta. Mari kita sukseskan usaha redaksi yang mulai membagi e-magazine kepada semua anggota ADPI dengan harapan benar-benar dapat kita manfaatkan dengan baik. □



Oleh: **Arif Hartanto SH. MH**
(Direktur Eksekutif LSPDP)

DANA PENSIUN BUMN JADI LADANG KORUPSI?

Baru-baru ini dalam dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan terlalu banyak dana pensiun ini menjadi tempat korupsi yang pada akhirnya tagihan-tagihan pensiunan tidak terbayarkan. Dalam diskusi di Media Berita Satu TV hari Jumat tanggal 3 Desember 2021, Ketua Umum ADPI yang menjadi nara sumber bersama dengan Pak Edwin Sebayang, menjelaskan bahwa Dana Pensiun khususnya DPPK telah memiliki Tata Kelola yang baik yang dipantau dengan ketat oleh stakeholders-nya, sehingga bila ada penyimpangan, tentunya dari awal sudah bisa terdeteksi.

TATA KELOLA DANA PENSIUN

POJK no 15 tahun 2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun mengatur dengan jelas bagaimana proses dan struktur di Dana Pensiun untuk pengelolaan yang jelas dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independensi dan kewajiban. Seluruh stakeholders Dana Pensiun, mulai dari Pendiri, Pengawas, Pengurus bahkan Peserta memiliki hak dan kewajiban yang jelas, ditambah lagi adanya pengawasan oleh OJK, dimana setiap Dana Pensiun ada seorang PiC dari OJK. Frekuensi rapat internal Pengurus atau Pengurus dengan Pengawas terjadwal dengan baik, yaitu Pengurus wajib rapat minimal sebulan sekali, dan rapat antara Pengurus dengan Pengawas adalah setiap tiga bulan. Di kesempatan ini, tentunya Pengawas akan bisa dan mampu mendeteksi bila ada ketidakwajaran dalam pengelolaan Dana Pensiun oleh Pengurus. Acuan dari Rencana Bisnis yang juga sudah disetujui oleh OJK merupakan sarana yang dijadikan acuan dalam pengelolaan dan pengawasan Dana Pensiun. Laporan Dana Pensiun kepada Pendiri terkait dengan laporan kinerja yang telah diaudit oleh Akuntan Publik akan menjadikan kinerja Dana Pensiun semakin transparan. Pemberian et aquit et de charge kepada Pengawas dan Pengurus oleh Pendiri memberikan kepastian bahwa

kinerja Pengurus dan Pengawas sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku.

PRINSIP TEPAT WAKTU, TEPAT ORANG DAN TEPAT JUMLAH

Tugas utama Dana Pensiun dalam mengelola lembaganya adalah membayar manfaat pensiun kepada pensiunan, janda/duda dan anak (sebelum mencapai usia dewasa), menuntut tercapainya konsep “asset liability management”, sehingga setiap saat, akan tersedia dana untuk keperluan pembayaran manfaat pensiun bagi pensiunan, termasuk bilamana ada program “pensiun dini” yang dilakukan oleh perusahaan pemberi kerja. Untuk itu, Pengurus dituntut untuk menempatkan dana investasinya, disesuaikan dengan kebutuhan operasionalnya, sehingga terwujudlah konsep “tepat waktu”. Dengan “tepat orang”, maka Dana Pensiun harus memastikan keberadaan pensiunan melalui berbagai pelaksanaan pemantauan peserta. Tidak jarang terjadi bahwa pensiunan sudah meninggal, tetapi tidak segera dilaporkan ke Dana Pensiun dan baru terdeteksi setelah dilakukan verifikasi. Bisa terjadi saat pensiunan meninggal, ternyata jandanya lebih dari satu orang. Terkait dengan “tepat jumlah”, bagi DPPK PPMP, sudah ada aturan jumlah atau besaran yang diterima oleh pensiunan, sesuai dengan rumus yang dimuat di Peraturan Dana Pensiun masing-masing.

KEWAJIBAN PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN

Sesuai dengan ketentuan dalam UU no 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun serta peraturan pelaksanaannya, yang wajib dibayarkan kepada peserta pensiunan adalah manfaat pensiun yang sudah dijanjikan. Dalam hal DPPK PPMP, manfaat pensiun yang dijanjikan tertera dalam PDP berupa rumus manfaat pensiun. Pada DPPK PPIP, manfaat pensiun peserta adalah akumulasi iuran ditambah dengan hasil pengembangan, yang wajib dibelikan anuitas seumur hidup ke perusahaan asuransi



jiwa, bila nominalnya diatas ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.

Data yang diperoleh dari asosiasi, belum pernah terjadi DPPK PPMP mengalami gagal bayar kepada pensiunan secara tepat waktu, tepat orang dan tepat jumlah. Yang mungkin menjadi masalah bagi Dana Pensiun adalah munculnya keinginan pensiunan untuk memperoleh manfaat pensiun yang lebih besar, atau pemberian manfaat saat hari raya keagamaan. Sejumlah DPPK PPMP sudah melaksanakan pembayaran bantuan hari raya keagamaan, tentunya dengan kontribusi dari Pendiri.

Pada DPPK PPIP, tahun 2021 diwarnai dengan munculnya krisis Jiwasraya, dimana kurang lebih 10 ribu pensiunan PPIP telah membeli anuitas seumur hidup di perusahaan pelat merah ini. Melalui apa yang disebut sebagai “restrukturisasi”, pembayaran manfaat pensiun sebagaimana diatur di UU Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya menjadi tidak lagi “seumur hidup”.

SEJUMLAH HAK KARYAWAN

UU no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan sejumlah manfaat yang diberikan kepada karyawan pada saat PHK, sebagaimana diatur di Pasal

156 UUK tersebut. Keterkaitan manfaat yang diatur di UUK tersebut dengan program pensiun adalah sebagaimana diatur di Pasal 167, dimana dimungkinkan adanya klausula untuk meng “offset” antara pesangon dengan manfaat pensiun, yaitu bila besaran pesangon lebih besar dari manfaat pensiun, maka perusahaan hanya menambah selisihnya, sedangkan bila besaran pesangon lebih kecil dari dana pensiunnya, maka perusahaan tidak perlu membayarkan uang pesangon tersebut.

Pada sejumlah perusahaan khususnya BUMN, ada ketentuan yang tidak meng-offset kedua unsur tersebut, sehingga karyawan yang di PHK, akan menerima kedua manfaat tersebut, baik pesangon maupun manfaat pensiun. Terkait dengan pernyataan Meneg BUMN sebagaimana dikutip diatas, diperoleh informasi bahwa yang tidak atau belum dibayarkan adalah sejenis “pesangon”, jadi sama sekali bukan manfaat pensiun. Memang masih ada persepsi bahwa semua yang dibayarkan kepada karyawan saat PHK adalah manfaat pensiun, yang dibayarkan oleh Dana Pensiun.

PENUTUP

Industri dana Pensiun adalah industri yang “highly regulated” sehingga pengelolaan Dana Pensiun harus dalam koridor peraturan-2 tersebut. Tata Kelola serta pengawasan yang “ketat”, akan membatasi tindakan Pengurus Dana Pensiun untuk menyimpang dari



DANA PENSIUN ADALAH INDUSTRI YANG “HIGHLY REGULATED”, PENGELOLAAN DANA PENSIUN HARUS DALAM KORIDOR PERATURAN YANG DITETAPKAN. TATA KELOLA SERTA PENGAWASAN YANG “KETAT”, AKAN MEMBATASI TINDAKAN PENGURUS DANA PENSIUN UNTUK MENYIMPANG DARI REGULASI.”

regulasi tersebut. Sampai dengan saat ini, baru ada 2 kasus pengelolaan di Dana Pensiun yang masuk ke ranah Pengadilan, yaitu satu orang Pengurus DPPK telah dijatuhi hukuman penjara selama 8 tahun dengan denda sejumlah tertentu, sedangkan satu kasus lagi Pengurus di vonis bebas murni, karena tidak terbukti melakukan korupsi. Pengurus DPPK, terutama DPPK PPMP, wajib melaksanakan sosialisasi program pensiun bagi pesertanya, terutama peserta aktif, sehingga peserta akan memahami haknya saat memasuki masa pensiun, Perlu juga disosialisasikan, manakala ada hak selain manfaat pensiun yang dikompensasikan dengan manfaat pensiun, sehingga karyawan menjadi jelas akan hak dan kewajibannya. Pada DPPK PPIP, untuk menghindari terulangnya kasus Jiwasraya, seyogyanya DPPK PPIP mengaplikasikan ketentuan POJK no 60 tahun 2020 tentang pembayaran manfaat pensiun berkala oleh Dana Pensiun... semoga. □

Selamat Tahun Baru 2022





Meraih Masa Depan Yang Lebih Baik



DANA PENSIUN PERTAMINA



Dana Pensiun
Universitas Surabaya



Pasar saham Indonesia sempat begitu memberi perhatian besar pada isu taper tantrum oleh bank sentral Amerika Serikat (AS). Maklum, pengalaman terguncangnya pasar saham selama 2013-2015 akibat taper tantrum masih begitu membekas. Namun, pernyataan The Fed yang hanya akan mengurangi stimulus secara bertahap, ditambah isu inflasi global yang terkendali kini lebih menenangkan pasar.

Pada sisi lain, di dalam negeri, ekonomi Indonesia memberi indikasi pemulihan yang menggembirakan. Koordinasi Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan akan menjamin pengendalian krisis berjalan optimal. Pada sisi lain, komponen pendukung pertumbuhan investasi sedang sangat optimal mendukung pertumbuhan, seperti ekspor-impor, konsumsi yang kuat, serta peningkatan realisasi investasi. Ekspor Indonesia yang didominasi industri pengolahan telah berdampak signifikan pada peningkatan cadangan devisa.

Berbagai kondisi positif ini makin meyakinkan pelaku pasar melihat peluang investasi di pasar saham pada 2022. Lewat laporan risetnya, *Head of Research* PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia Hariyanto Wijaya memperkirakan, dampak *tapering tantrum* The Fed akan sangat minimal terhadap pasar modal Indonesia. Alasannya, kondisi makro ekonomi Indonesia saat ini dalam kondisi relatif solid, termasuk karena rendahnya *current account deficit* (CAD) dan besarnya cadangan devisa negara.

"Kami mempercayai risiko *tapering tantrum* akan sangat minimal terhadap pasar modal Indonesia karena investor asing terlihat sangat mempercayai Indonesia yang ditunjukkan dengan deras arus modal asing ke pasar saham yang mencapai Rp 41,6 triliun sejak awal tahun hingga Oktober 2021," ujar dia.

Sementara itu, *Investment Specialist* PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI), Dimas Ardhinugraha mengatakan, capital inflow ke pasar saham Indonesia semakin kuat di tengah kabar pengetatan moneter oleh The Fed. Minat terhadap saham kapitalisasi besar serta saham berbasis teknologi tampak meningkat menjelang tutup tahun 2021. Saham berbasis ekonomi digital, menurut Dimas, menawarkan prospek investasi jangka panjang yang didukung tren struktural industri dalam negeri yang



FUNDAMENTAL SOLID, DUKUNGAN KUAT UNTUK PASAR SAHAM

Berbagai indikator makro akan menjadi katalisator kebangkitan pasar saham 2022. Dukungan juga datang dari IPO yang lebih marak, **termasuk sejumlah nama besar dari kelompok BUMN**. Sejumlah lembaga besar merekomendasikan beberapa saham yang dianggap potensial masuk portofolio pada 2022.

juga berkembang pesat ke arah digital.

Berbagai kondisi ini makin memperkuat optimisme menyongsong 2022. Mendukung optimisme tersebut, *Senior Portfolio Manager* MAMI, Samuel Kesuma mengatakan, kemajuan penanganan pandemi dan perbaikan kondisi fundamental membuat pasar saham menawarkan peluang pertumbuhan yang menjanjikan tahun depan.

Menurut dia, prospek pemulihan ekonomi yang lebih kuat dan *resilient*, mendorong normalisasi pertumbuhan profitabilitas perusahaan ke level yang lebih sehat pada 2022. "Hal lainnya adalah peluang pertumbuhan *e-economy* yang cerah mendorong tingginya minat investor, terutama didukung oleh potensi inklusi pada indeks saham global dan rencana IPO beberapa

saham *e-economy* di 2022," jelas Samuel.

Berpatokan pada berbagai sentimen positif itu, MAMI memutuskan mempertahankan posisi *overweight* pada sektor inti yang mendapatkan manfaat dari perubahan struktural, seperti *e-economy*, *green economy*, dan telekomunikasi. "Sementara itu, secara selektif kami mengambil posisi *overweight* pada beberapa sektor yang menjadi proxy pembukaan kembali ekonomi, seperti finansial, otomotif, dan properti. Kami memperkirakan indeks harga saham gabungan (IHSG) akan berada di level 7.600 (pada 2022)," urai Samuel.

Optimisme ini mendapat dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta pasar

modal Indonesia pada 2022. Di antaranya mendorong penerapan ekonomi hijau. OJK pun meyakini ekonomi 2022 akan lebih baik dibandingkan dengan 2021. Hal ini menjadi daya dorong bagi pasar saham, sebagaimana sudah dirasakan menjelang tutup tahun 2021. “Pendorong dari *composite index* yang tinggi ini dari sektor teknologi, *consumer product*, dan kesehatan. Kondisi ini sudah jauh lebih tinggi daripada sebelum pandemi Covid-19, bahkan pada saat titik terendah 24 Maret 2020, IHSG kita di sekitar level 3.900,” ujar Wimboh Santoso.

Wimboh menambahkan, peningkatan likuiditas transaksi pasar saham karena kepercayaan pelaku pasar pada fundamental Indonesia tetap tinggi. Hal ini seiring dengan basis ekonomi Indonesia adalah konsumsi dalam negeri, sehingga saat mobilitas dibuka, maka semua sektor akan bergerak. Sektor yang memiliki kaitan dengan teknologi makin penting dan besar sumbangannya ke pasar saham.

Menurut Wimboh, makin banyak *start-up* yang melakukan *fund raising* di pasar modal. Bahkan ada *startup* lain yang siap masuk ke bursa dengan jumlah target raihan dananya cukup besar. “Itu semua memberikan peluang pada investor ritel, di mana pada masa pandemi *nggak* bisa melakukan berbagai aktivitas karena ruangnya sempit untuk mobilitas. Banyak investor ritel di pasar saham, yang meningkat cukup tinggi,” jelas Wimboh.

Sampai akhir 2021 misalnya, mobilisasi dana oleh emiten di pasar modal diprediksi bisa mencapai Rp 350 triliun atau melonjak 195% dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp 118,7 triliun. Berdasarkan data OJK per 7 Desember 2021, nilai *penggalangan dana* di pasar modal mencapai Rp 335,8 triliun atau meningkat 183% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp 118,7 triliun.

Nilai sebesar itu merupakan gabungan antara emisi saham, *rights issue*, maupun emisi obligasi dan sukuk. “Selain itu, dalam catatan masih ada 11 lagi penawaran umum senilai Rp 13,99 triliun yang segera diproses sampai akhir tahun ini dan mungkin bisa lebih,” ujar Wimboh Santoso saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR.

Optimisme di balik penggalangan dana di pasar modal menunjukkan indikasi pemulihan ekonomi dengan dukungan fundamental yang mumpuni. “OJK terus berupaya meningkatkan basis suplai, antara

lain mengkomodasi calon emiten dari *new economy start-up* untuk melakukan IPO dan meramaikan perdagangan saham di pasar modal Indonesia,” terang Wimboh.

Maraknya penggalangan dana saling menopang dengan pertumbuhan investor ritel yang makin kuat. Menurut data OJK, jumlah investor pasar modal terus meningkat menjadi 7,2 juta per November 2021. Ini artinya terjadi pertumbuhan hingga 101,72% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Khusus investor ritel milenial menempati porsi 59,81% per November 2021, meningkat dari akhir Desember 2020 yang sebesar 54,9%.

Data BEI menunjukkan, jumlah emiten baru sampai 8 November sebanyak 53 perusahaan. Dengan demikian, total emiten BEI mencapai 762 perusahaan. BEI juga



HEBOH VARIAN OMICRON, TIDAK BANYAK MEMPENGARUHI RENCANA MANAJEMEN CALON EMITEN. SETELAH BEBERAPA PENCATATAN PADA AWAL DESEMBER, ADA BEBERAPA PERUSAHAAN YANG SEDANG PROSES PENAWARAN SEPERTI PT RMK ENERGY, PT AVIA AVIAN, PT OBM DRILCHEM DAN PT INDO PURECO PRATAMA. DUA NAMA LAIN, PT ADHI COMMUTER PROPERTI DAN PT DHARMA POLIMETAL DALAM PROSES BOOK BUILDING.”

mencatat, masih ada 24 perusahaan yang sudah masuk daftar untuk IPO.

Saat berita ini ditulis, beberapa perusahaan seperti PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR) dan PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP), tengah menggelar penawaran awal (*book building*). Manajemen Adaro Minerals mengharapkan pernyataan efektif dari OJK terbit pada 22 Desember 2021 sehingga bisa dicatatkan pada hari penutupan bursa, pada 30 Desember 2021.

Direktur BEI, I Gede Nyoman Yetna mengatakan, heboh soal varian baru corona Omicron tidak mempengaruhi rencana manajemen calon emiten. Setelah beberapa pencatatan pada awal Desember, ada beberapa perusahaan yang sedang proses penawaran seperti PT RMK Energy, PT Avia Avian, PT OBM Drilchem dan PT Indo Pureco Pratama. Dua nama lain, PT Adhi Commuter Properti dan PT Dharma Polimetal dalam

proses *book building*.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan sedang menyiapkan beberapa BUMN dan anak usaha untuk IPO maupun *right issue* pada awal 2022. Erick menunjuk nama PT Pertamina Geothermal Energy (Persero) dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) yang siap melakukan penawaran umum saham. Sedangkan yang akan *rights issue* adalah PT Semen Indonesia Tbk, PT Bank Tabungan Negara Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Krakatau Steel Tbk, dan PT Kimia Farma Tbk.

Menurut Erick Thohir, IPO dan *rights issue* beberapa BUMN ini bertujuan mencari alternatif pendanaan dari publik supaya perusahaan pelat merah tidak terus menerus mengandalkan Penyerahan Modal Negara (PMN). Selain itu, dengan IPO bisa mengikuti arus globalisasi terutama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Arus global dimaksud tidak lain tren dunia menuju penerapan *green economy*.

Pada sisi lain, dukungan fundamental ekonomi yang kuat akan berdampak positif pada kinerja emiten. Implikasinya saham-saham emiten ini makin potensial. Menurut HSBC Global peluang pertumbuhan kinerja emiten Indonesia sangat besar. Lembaga keuangan yang berbasis di London ini pun merekomendasikan para investor untuk mencermati sejumlah saham potensial.

Saham perbankan yang mendominasi kapitalisasi pasar BEI dinilai masih menjadi pilihan potensial, Bank BRI (BBRI), Bank Mandiri Tbk (BMRI), Bank BNI (BBNI), dan Bank Central Asia (BBCA). Alasannya, kinerja bank-bank paling cepat pulih saat perekonomian Indonesia pulih.

HSBC juga menyarankan investor mencermati saham Astra International Tbk (ASII) karena penjualan kendaraan roda empat yang diprediksi akan meningkat menjadi 900 ribu unit pada 2022, naik dari tahun ini sekitar 800 ribu unit. Selain ini saham consumer goods seperti PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) juga masuk radar HSBC karena dinilai punya *cashflow* sangat. Dari kelompok perusahaan berbasis teknologi, HSBC menjagokan salah satu PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK).

Nama-nama yang disebut hanya alternatif. Dana pensiun bekesempatan mencermati banyak alternatif lain, sesuai dengan tujuan investasi masing-masing. Tentu saja perlu didahului kalkulasi yang cermat. □

Pasar obligasi Indonesia selama 2021 dalam kondisi positif. Bisa dimaklumi karena Indonesia sedang melewati era suku bunga rendah. Sebagaimana kita ketahui, suku bunga acuan Bank Indonesia berada pada level terendah sepanjang masa. Kondisi tersebut sangat kondusif pada pasar obligasi dan karenanya selama 2021 instrumen investasi ini mampu memberikan imbal hasil sangat menarik.

Ada asumsi, pasar obligasi 2022 akan berbeda dibanding 2021. Indikasi penyesuaian suku bunga acuan, yang dipengaruhi kebijakan taper tantrum Bank Sentral Amerika menjadi titik perhatian. Asumsinya, saat terjadi kenaikan suku bunga harga obligasi cenderung turun. Hal ini membuat daya tarik pasar menurun.

Meski demikian, ada optimisme, kenaikan bunga akibat kebijakan The Fed tidak sedramatis pada kejadian tahun 2013 hingga 2015. Selain pengurangan stimulus oleh The Fed akan berlangsung secara gradual, konsolidasi antar otoritas di Indonesia saat ini jauh lebih optimal. Bank Indonesia juga menyatakan baru akan menyesuaikan suku bunga acuan saat diperlukan. "Kebijakan suku bunga rendah, sekarang 3,5% akan tetap kami pertahankan sampai terdapat tanda-tanda awal kenaikan inflasi," ujar Gubernur BI, Perry Warjiyo saat berbicara pada acara Pertemuan Tahunan BI.

Ada hal kunci yang diprediksi bisa membuat pasar obligasi 2022 tetap menarik. Pertama adalah koordinasi antara pemerintah dengan BI dalam skema burden sharing yang masih akan berlanjut pada 2022. Pembelian Surat Berharga Negara (SBN) oleh BI masih akan dilanjutkan. Lewat skema burden sharing, Bank Indonesia masih akan melakukan pembelian SBN senilai Rp 215 triliun untuk tahun 2021.

Untuk tahun 2022, BI sudah menyatakan kesediaan melanjutkan skema burden sharing. Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan, pembelian SBN tahun 2022 akan berlanjut dengan nilai pembelian sekitar Rp 224 triliun. Pembelian obligasi di pasar perdana

MEMBACA ARAH PASAR OBLIGASI 2022

Pasar obligasi pada 2022 diprediksi masih sangat menarik sebagai alternatif investasi. Walau dibayangi isu *tapering off*, kebijakan berbagai pendekatan ekonomi dalam negeri diprediksi akan menjamin stabilitas pasar surat utang.

ini akan turut menopang harga obligasi Indonesia, karena akan berkontribusi terhadap permintaan (demand) untuk menopang harga.

Lebih lanjut Perry mengatakan, fokus BI pada penurunan lebih lanjut suku bunga kredit perbankan. Saat ini perbankan umumnya mengalami kelebihan likuiditas. Karena itu perlu diturunkan secara bertahap dengan memenuhi prinsip kehati-hatian. Langkah ini bertujuan untuk tidak mengganggu kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit sekaligus punya kemampuan dalam pembelian SBN untuk pembiayaan APBN. Selain berkomitmen dalam pembelian SBN untuk APBN tahun 2022 secara langsung sebesar Rp224 triliun, BI juga akan tetap sebagai pembeli siaga.

Daya tarik di pasar obligasi Indonesia masih soal yield yang dinilai masih salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Pasifik. Real yield atau imbal hasil merupakan selisih antara imbal hasil obligasi 10 tahun dan tingkat inflasi dalam negeri. Real yield obligasi Indonesia saat ini masih berada di atas 4%, yakni dari imbal hasil obligasi 10 tahun sekitar 6,1%, dikurangi inflasi yang sebesar 1,75% masih terdapat selisih 4,35%.

Pasar obligasi Indonesia saat ini didominasi investor domestik. Porsi kepemilikan investor asing di pasar obli-

gasi Indonesia saat ini sekitar 21%, jauh lebih rendah dibanding posisi akhir 2019 sekitar 38%. Hal ini meminimalkan risiko pelemahan pasar yang dalam akibat dana asing keluar dari Indonesia.

Isu inflasi yang disebut bisa mempengaruhi kebijakan AS secara drastis diprediksi tidak terjadi karena inflasi global diyakini mengalami moderasi pada 2022. Hal ini terjadi karena perbaikan rantai pasokan global. HSBC Global Research memprediksi, Indonesia saat ini mendapatkan banyak manfaat dari kenaikan harga batu bara, karena berimbas langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Sejalan dengan itu, modal investasi ke sektor ini meningkat seperti juga terjadi pada industri pengolahan nikel. Hal ini akan menopang upaya pemulihan ekonomi Indonesia.

Menurut HSBC Global Research, belakangan kepemilikan investor asing di obligasi negara Indonesia turun signifikan. Kondisi ini tentu saja mengurangi volatilitas obligasi sekaligus mengurangi ketergantungan pasar Indonesia terhadap portofolio investor asing.

Chief Asean Economist HSBC Joseph Incalcaterra mengatakan, saat ini sentimen eksternal yang mempengaruhi perekonomian Indonesia mulai membaik. Hal ini ditopang defisit transaksi berjalan yang mulai menurun dan pembiayaan

melalui kondisi foreign direct investment (FDI) meningkat. “Indonesia mendapatkan manfaat dari kenaikan harga komoditas dan juga investasi asing dalam FDI meningkat sehingga bisa menutupi defisit transaksi berjalan,” ujar Joseph Incalcaterra.

Menjelang akhir tahun, cukup menonjol penawaran perdana saham (initial public offering/IPO) dari perusahaan berbasis teknologi. Tren ini, kata Joseph Incalcaterra, menjadi momentum terjadinya transformasi di pasar saham Indonesia. Jika sebelumnya saham bank konvensional menjadi motor pergerakan

(MAMI), Dimas Ardhinugraha, perhatian pasar masih mengacu pada langkah The Fed. “Namun sejauh ini The Fed memandang kenaikan inflasi bersifat sementara dan belum melihat potensi kenaikan suku bunga secara agresif,” ujar Dimas.

Ia menambahkan, pasar obligasi Indonesia kini lebih siap dalam menghadapi tren perubahan sentimen global. Selain faktor kepemilikan asing yang lebih rendah, dinamika pasokan obligasi saat lebih baik dengan tingkat imbal hasil obligasi yang menarik. Kondisi ini diharapkan dapat meredam dampak kebijakan moneter The Fed yang lebih ketat pada

si usaha, tren emisi obligasi 2022 juga dipengaruhi rencana pelunasan obligasi jatuh tempo. Sesuai data Pefindo, nilai obligasi jatuh tempo tahun 2022 sekitar Rp 143 triliun. “Obligasi jatuh tempo tahun 2022 sekitar Rp 143 triliun, sehingga emisi baru untuk refinancing akan terjadi,” ujar Salyadi.

Tren emisi baru dan kondisi pasar yang kondusif akan membuat pasar surat utang 2022 akan tetap menjadi alternatif investasi menarik bagi investor. Direktur Manulife Aset Manajemen, Ezra Nazula mengatakan, koordinasi yang solid antara otoritas fiskal dan moneter berimplikasi

mengurangi tekanan terhadap peringkat kredit Indonesia.

Koordinasi solid ini akan positif untuk pasar surat utang. Dengan demikian investasi di pasar surat utang masih menjanjikan return menarik pada 2022. “Diperkirakan, imbal hasil obligasi pemerintah dengan durasi 10 tahun untuk tahun 2022 akan berada di level 6% - 6,25%,” ujar Ezra Nazula.

Jika dibandingkan dengan imbal hasil pasar surat utang di negara-negara kawasan Asia lain, menurut Ezra Nazula, pasar obligasi Indonesia masih memberikan imbal hasil riil yang relatif tinggi. Selain imbal hasil riil lebih menarik, pasokan produk cukup terkendali dan permintaan domestik relatif kuat. Hal ini didukung pertum-

buhan kredit yang masih relatif rendah dan imbal hasil obligasi yang menarik.

“Faktor sentimen dan fundamental yang lebih kokoh berkontribusi pada stabilitas pergerakan pasar obligasi Indonesia, menjadi sarana diversifikasi portofolio yang baik,” tutur Ezra Nazula.

Ketahanan fundamental ekonomi menjadi kunci pergerakan pasar keuangan 2022. Hal ini akan menopang stabilitas nilai tukar rupiah, yang ditopang kebijakan moneter yang baik, yang didukung prinsip kehati-hatian oleh BI, ketahanan eksternal yang kuat, dan cadangan devisa yang memadai. Dukungan iklim investasi yang kuat akan menjadi sisi positif bagi pasar keuangan. □



(FOTO: VOT.ID)

pasar saham, seiring berjalannya waktu, perusahaan teknologi besar (big tech) mulai berkontribusi signifikan pada pergerakan pasar saham Indonesia.

LEBIH SOLID

Didukung berbagai kebijakan makro pemerintah pasar obligasi Indonesia tahun 2022 diprediksi akan lebih siap menghadapi dampak penerapan tapering (pengurangan stimulus) oleh Amerika Serikat. Hal ini ditopang meningkatnya aliran modal asing ke pasar saham dan rendahnya kepemilikan investor asing di pasar obligasi.

Menurut Investment Specialist PT Manulife Aset Manajemen Indonesia

2022. “Fundamental makro yang lebih baik dan stabilitas eksternal yang terus diperkuat diharapkan dapat menjaga volatilitas pasar obligasi Indonesia,” ujar Dimas.

Seiring dengan kondisi makro yang solid, emisi obligasi tahun 2022 diprediksi akan tetap marak. Pefindo memperkirakan, emisi obligasi 2022 akan berada pada kisaran Rp 125 triliun hingga Rp 135 triliun. Indikasi pemulihan ekonomi akan direspons dunia usaha dengan perluasan usaha yang tentu saja butuh dukungan modal, termasuk dari pasar surat utang.

Presdir Pefindo, Salyadi Saputra mengatakan, selain untuk dukungan ekspansi



Oleh: Siti Rakhmawati
(Direktur Investasi Dapen Telkom)

REFORMASI & TRANSFORMASI SISTEM PENSIUN DI MASA-MASA SULIT*)

“[The findings on gender pension gap] **is a clear result** and signal of gender inequalities”.
[Mathilde Mesnard, OECD]

Pada tanggal 19 Oktober lalu telah dirilis publikasi “2021 Mercer CFA Institute Global Pension Index”. Laporan tahunan yang merupakan rilis ketiga belas dan merupakan kolaborasi antara Mercer, Monash University, dan Monash Centre for Financial Studies (MCFS) yang selama dua tahun terakhir disponsori oleh CFA Institute (organisasi profesi investasi <https://www.cfainstitute.org>) sebagai salah satu wujud dari misinya “to lead the investment profession globally by promoting the highest standards of ethics, education, and professional excellence for the ultimate benefit of society” ini, mensurvei dan merating sistem pensiun dari 43 negara serta merekomendasikan upaya untuk perbaikan di masing-masing sistem.

Dalam artikel tentang publikasi tahun lalu disebutkan bahwa dalam 2015 *Global Market Sentiment Survey*, para member CFA Institute ditanya tentang risiko yang paling disepelkan namun dapat berpengaruh negatif terhadap pasar modal global dalam 5 tahun ke depan. Hasilnya 20% responden memilih dampak dari tren populasi yang menua, sedangkan 14% memilih defisit pendanaan dana pensiun serta tingkat tabungan pensiun yang rendah. Selain itu juga dilakukan riset terhadap *industry trust*, yang menunjukkan bahwa hampir separuh pengelola dana pensiun dengan program manfaat pasti (*defined benefit*) harus mengantisipasi terus berkurangnya manfaat pensiun dalam sepuluh tahun ke depan. Namun sebaliknya, sekitar 70% peserta yakin bahwa janji manfaat pensiun dapat dibayar

sesuai janji. Hal ini merupakan *deferred trust deficit* yang harus menjadi perhatian, terlebih dengan adanya tambahan tantangan antara lain sebagai berikut:

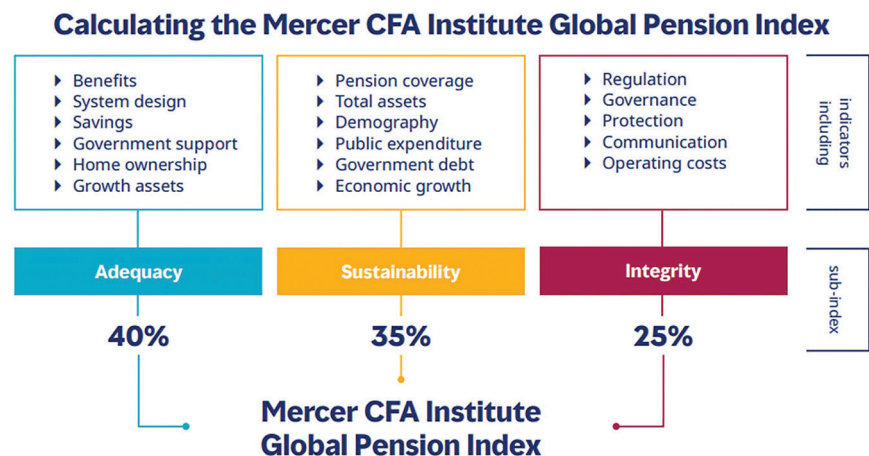
- Populasi yang menua akibat menurunnya tingkat kelahiran serta meningkatnya usia harapan hidup,
- Trend suku bunga yang semakin menurun, yang memunculkan pertanyaan yang signifikan mengenai strategi investasi dana pensiun yang tepat, dan di sisi lain berdampak terhadap kenaikan kewajiban sehingga menurunkan Rasio Kecukupan Dana,
- Ketidakpastian hasil investasi,
- Dampak pandemi COVID-19,

- *Gender pension gap*, yang merupakan isu baru dalam edisi tahun ini.

Memang tidak mudah untuk membuat rating ini karena setiap sistem pensiun merupakan hasil evolusi dari kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik dan juga sejarahnya masing-masing. Keterbatasan data serta *assessment* terhadap implementasi dari aturan menyebabkan laporan ini dibuat hanya dengan mengandalkan data dan informasi yang telah dipublikasi serta aturan yang ada, terlepas dari efektivitas dan disiplin dalam implementasinya. Namun kendala tersebut tidak menghalangi upaya untuk menyajikan pelajaran, pengalaman atau gagasan yang bermanfaat bagi pengembangan dan reformasi sistem pensiun.

SISTEM PENSIUN YANG IDEAL

Indeks ini disusun berdasarkan tiga sub indeks yaitu kecukupan, keberlanjutan dan integritas dengan indikator dan bobot masing-masing sub indeks sebagai berikut:



Meskipun tidak ada sistem pensiun yang sempurna yang dapat diterapkan secara universal mengingat perbedaan konteks di masing-masing negara, namun terdapat beberapa tujuan serupa yang dapat diacu untuk mencapai hasil yang lebih baik, sebagai berikut:

1. ASPEK KECUKUPAN

- Terdapat minimal jumlah manfaat pensiun bagi rakyat miskin yang mencerminkan persentase yang wajar terhadap rata-rata penghasilan masyarakat.
- Perbandingan antara penghasilan di masa pensiun dengan masa bekerja bagi median pekerja penuh waktu setidaknya sebesar 70%.
- Setidaknya 60% dari akumulasi tabungan pensiun tidak diambil secara sekaligus.

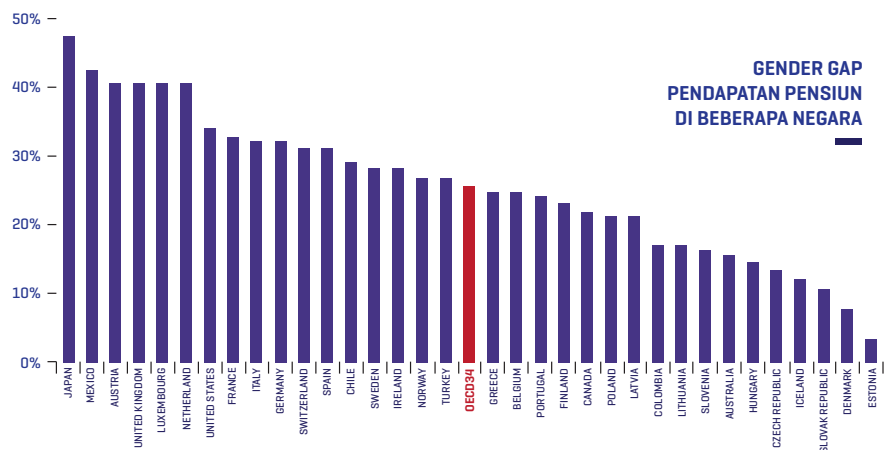
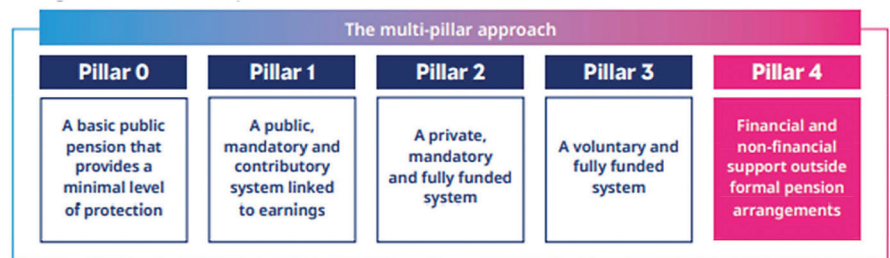
2. ASPEK KEBERLANJUTAN

- Setidaknya 80% dari populasi pekerja menjadi peserta dana pensiun sukarela.
- Aset dana pensiun saat ini lebih besar dari 100% GDP sehingga dapat mendanai kewajiban pensiun di masa mendatang.
- Angka partisipasi kerja bagi penduduk berusia 55 sampai dengan 64 tahun setidaknya sebesar 80%.

3. ASPEK INTEGRITAS

- Terdapat regulator yang kuat dan prudent yang mengawasi dana pensiun.
- Terdapat komunikasi secara berkala kepada peserta mencakup provisi personal statements, proyeksi manfaat pensiun yang akan diterima, serta laporan tahunan.
- Aturan pendanaan yang jelas baik pada dana pensiun dengan program manfaat pasti maupun iuran pasti.

Idealnya, manfaat pensiun diberikan dalam multi pilar di mana setiap pilar memiliki tujuan tersendiri dan bersifat komplementer:



ISU ESG DAN GENDER GAP

Selain isu ESG (Environmental, Social & Governance) yang dipertimbangkan dalam penyusunan strategi atau kebijakan investasi mengingat dalam praktiknya sangat didukung oleh regulator di beberapa negara, dalam edisi tahun ini juga diangkat isu kesenjangan gender yang mengacu pada publikasi *gender gap* dalam sistem pensiun di negara-negara OECD yang diterbitkan di bulan Maret 2021 lalu bertepatan dengan Hari Perempuan Sedunia, dengan temuan bahwa di atas usia 65 tahun perempuan menerima pendapatan pensiun 26% lebih rendah dibanding laki-laki.

Data gender pensiun *gap* yang didefinisikan sebagai perbedaan antara rata-rata pendapatan pensiun laki-laki dibanding perempuan ini menunjukkan bahwa kesenjangan terbesar terdapat di Jepang yang mendekati angka 50%, sedangkan yang terendah adalah Estonia dengan *gap* sekitar 5%.

Diperlukan komitmen lintas sektoral untuk memperkecil kesenjangan ini mengingat penyebab *gender gap* ini juga bersifat multi dimensi antara lain sebagai berikut:

1. Isu Ketenagakerjaan

- Perempuan memiliki masa kerja yang relatif lebih pendek (awal yang terlambat dan akhir yang lebih dini) yang kemungkinan disebabkan karena memiliki pasangan yang lebih tua.
- Perempuan relatif lebih banyak bekerja secara paruh waktu.
- Dampak jangka panjang dari pengurangan lapangan kerja terhadap peluang promosi dan pendapatan seumur hidup bagi sebagian perempuan
- Tanggung jawab perempuan terhadap pengasuhan keluarga (anak dan orang tua). Data di negara OECD menunjukkan bahwa perempuan bekerja pada usia 15-64 tahun adalah sebesar 48%, jauh lebih kecil dibanding laki-laki sebesar 69%. Kesenjangan terbesar adalah di usia 25-44 tahun.
- Rata-rata pendapatan yang lebih rendah mengingat pendapatan di bidang-bidang yang didominasi perempuan seperti pelayanan, mengajar serta sektor publik relatif lebih rendah dibanding bidang yang didominasi laki-laki seperti *nut-*

	ZERO PILLAR	FIRST PILLAR	SECOND PILLAR	THIRD PILLAR
Type	Social Assistance	Mandatory Non-Contributory	Mandatory Contributory	Voluntary
Objective	Poverty Eradication (Target: Poverty line)	Basic Income (Target: $\pm 40\%$ dari UM)	Income Replacement (Target: min. 40% upah)	Extra Income
Financing	Tax Revenue	Tax Revenue	Funded (Contributions)	Financial Assets
Indonesia	PKH	X	SJSN (DB & DC; Total iuran: 8,7%) PNS, TNI, dan POLRI (DB & DC; Total iuran: 8% Gapok)	Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DB & DC) Dana Pensiun Pemberi Kerja (DC)
Malaysia	Zakat, Bantuan Orang Tua	X	Public sector (DB), EPF (DC): 21% - 22% (Pemberi Kerja: 12% - 13%) LTAT (DC), SOCSO (DB)	PRS, Insurance (Annuity)
Australia	X	Age Pension	Superannuation Guarantee (9,5% - akan naik jadi 12%)	Voluntary super contributions
Kanada	X	OAS, GIS, SPA, dan WSPA	CPP/QPP (pekerja dan pemberi kerja 5,5%, self-employed: 10,5%)	Employment Pension Plans (DB and DC Pension Plans) Individual Retirement Savings (RRSP's - Group, Spousal, and Pooled)

shell, keuangan, teknik dan sektor swasta.

- Dalam beberapa kasus ditemukan bahwa perempuan dibayar lebih rendah dibanding laki-laki untuk pekerjaan yang sama.

2. Isu Desain Sistem Pensiun

- Aturan eligibilitas dalam pengaturan pensiun. Menarik bahwa di UK 23% perempuan dan 13 % laki-laki bekerja tidak memenuhi syarat minimal pendapatan untuk menjadi anggota dana pensiun.
- Iuran dana pensiun selama masa cuti melahirkan tidak dipersyaratkan. Meskipun iuran pensiun dibayar, namun penghasilan dasar untuk menghitung manfaat pensiun mungkin lebih rendah dibanding gaji penuhnya
- Ketiadaan kredit pensiun selama pengasuhan anak di kebanyakan negara. Namun system pensiun di Canada, Finlandia, Jerman dan UK telah memiliki feature ini.
- Ketiadaan manfaat bagi *survivor* saat pensiun dibayarkan akan membuat perempuan lebih terdampak karena perempuan memiliki usia harapan hidup yang lebih lama dan istri biasanya lebih muda dibanding suami.
- Ketiadaan indeksasi pensiun akan membuat perempuan lebih terdampak karena mereka memiliki usia harapan hidup yang lebih panjang.
- Perubahan program pensiun dari manfaat pasti ke iuran pasti akan mengakibatkan pendapatan pensiun perempuan relatif lebih rendah karena mereka hidup lebih lama dibanding laki-laki.
- Pengaturan penarikan dana pensiun akan berdampak lebih besar bagi perempuan karena mereka memiliki usia harapan hidup yang lebih panjang.
- Penggunaan table mortalitas berbasis

gender berdampak pada annuitas yang lebih rendah bagi perempuan karena mereka memiliki tingkat mortalitas yang relatif lebih rendah.

3. Isu Sosial Budaya

- Ketiadaan tempat penitipan anak yang layak dan terjangkau serta kekurangan opsi dukungan pemerintah bagi pengasuhan anak, menjadi kendala bagi orang tua, khususnya ibu, untuk tetap bekerja.
- Dampak biaya pengasuhan anak terhadap iuran dana pensiun sukarela biasanya dibayarkan secara langsung kepada perempuan, bukannya dibagi dengan pasangan.
- Tingkat *financial literacy* yang relatif lebih rendah bagi perempuan, mempengaruhi kualitas keputusan finansial.
- Komunikasi dan kampanye dari dana pensiun biasanya mengabaikan kebutuhan spesifik perempuan dan menggunakan bahasa yang kurang menarik bagi perempuan.
- Hak-hak pensiun yang dikumpulkan bersama dalam pernikahan tidak secara normal dibagi rata apabila terjadi perceraian, mengakibatkan perempuan mendapatkan manfaat pensiun yang lebih rendah.
- *Gender stereotyping* dapat mengakibatkan perbedaan bidang pendidikan serta harapan bahwa perempuan melakukan pekerjaan keluarga yang tidak dibayar.
- Variasi dalam pola bekerja di beberapa masyarakat yang merefleksikan perbedaan atau preferensi budaya.

SISTEM PENSIUN DI INDONESIA

Mengutip data yang diolah oleh Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, rasio aset dana pensiun terhadap PDB di Indonesia pada

tahun 2019 baru mencapai sekitar 6%, jauh di bawah Australia dan Kanada yang berada di kisaran 150% atau negara jiran Malaysia sekitar 65%. Mengacu pada simulasi yang dibuat oleh Prospera, pada skenario status quo, aset Pensiun di Indonesia diperkirakan hanya mencapai 13% dari PDB di tahun 2045. Untuk mencapai +60% di tahun yang sama, perlu peningkatan penerimaan iuran pensiun 5-6 kali lipat. Hal ini juga menimbulkan kurang optimalnya dana jangka panjang dalam negeri untuk pembangunan. Upaya peningkatan penerimaan iuran pensiun ini juga mengalami tantangan terkait isu nasional tentang kegagalan pemenuhan hak pensiun dan tata kelola investasi yang kurang baik baru-baru ini.

Badan Kebijakan Fiskal juga menyusun perbandingan sistem pensiun di Indonesia dengan negara lain dengan catatan bahwa Indonesia belum memiliki program untuk sektor informal dan belum terintegrasi secara harmonis.

Dalam publikasi 2021 Mercer CFA Institute Global Pension Index tahun ini, Indonesia berada di peringkat keenam di Asia serta peringkat ke-35 dari 43 negara yang disurvei, dengan kategori C yang berarti telah memiliki sistem pensiun dengan beberapa fitur yang bagus, namun juga memiliki risiko dan/atau kekurangan besar yang apabila tidak diatasi, maka efikasi dan kesinambungan dalam jangka panjangnya patut dipertanyakan.

Di tahun 2021 skor Indonesia turun menjadi 50,4 dari skor tahun 2020 sebesar 51,4 akibat turunnya angka pertumbuhan ekonomi riil. Sebagaimana tahun lalu, dari ketiga sub index, sub index integrity yang diindikasikan oleh kecukupan regulation, governance, protection, communication dan operating

costs untuk merepresentasikan trust kepada sistem pensiun, mendapat skor yang paling tinggi.

Skor tahun 2020 sebesar 51,4 juga turun dibanding tahun 2019 sebesar 52,2 karena turunnya net replacement rate (perbandingan pendapatan bersih saat pensiun dengan pendapatan bersih sebelum pensiun) yang dipublikasikan oleh OECD akibat penambahan usia harapan hidup yang meningkatkan longevity risk. Sedangkan pada tahun 2018 skor Indonesia berada di level 53,1, di tahun 2017 di level 49,9 di tahun 2016 di posisi 48,3 dan tahun sebelumnya lagi di level 48,2. Secara historis Indonesia telah berhasil melakukan perubahan besar dalam sistem pensiun lewat regulasi BPJS di 2015, naik ke level C di mana sebelumnya masih berada di level D.

Dalam report tersebut disebutkan bahwa sistem pensiun di Indonesia dapat ditingkatkan antara lain:

- Support pendapatan minimal bagi masyarakat miskin yang sudah tua.
- Memperluas jangkauan kepesertaan pensiun bagi karyawan dan pekerja mandiri sehingga dapat meningkatkan level tabungan serta aset pensiun.
- Memperpanjang usia pensiun, mengingat terdapat trend kenaikan usia harapan hidup.
- Meningkatkan regulasi bagi sistem pensiun sukarela.
- Meningkatkan peraturan komunikasi kepada peserta dana pensiun.

Disarikan dari berbagai sumber, beberapa peluang peningkatan juga dapat dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

- Memperbanyak dukungan dan perubahan kebijakan untuk mendorong kontribusi pensiun swasta serta meningkatkan fleksibilitas agar pekerja tidak dirugikan apabila berpindah pekerjaan (portability feature).
- Mengurangi kebocoran tabungan pensiun sebelum masa pensiun antara lain dengan membatasi akses untuk mencairkan dana BPJS dan DPLK.
- Meningkatkan tata kelola dan transparansi untuk meningkatkan kepercayaan peserta dan masyarakat.
- Melakukan gerakan financial literacy agar masing-masing individu dapat melakukan perencanaan pensiun se-

cara proaktif dan customized, terlebih dengan adanya trend pergeseran dari program pensiun manfaat pasti ke iuran pasti yang tidak dapat memberikan kepastian hasil investasi,

- Memperluas pasar DPLK dengan mengizinkan asset management dan sekuritas untuk mendirikan DPLK, tidak hanya asuransi jiwa dan bank,
- Tersedianya produk anuitas yang dapat diandalkan dan kompetitif, terlebih dengan adanya trend perubahan dari program pensiun manfaat pasti menjadi iuran pasti
- Meningkatkan insentif pajak untuk mendorong masyarakat untuk menambah tabungan pensiun.
- Menyederhanakan proses pendaftaran DPLK melalui digital channels.
- Upaya untuk mengurangi gender pension gap.

PENUTUP

Pada bulan Juli 2021 lalu CFA Society Indonesia berkolaborasi dengan Mercer Indonesia menyelenggarakan webinar nasional “Sistem Pensiun di Indonesia” dengan narasumber Mercer regional serta benchmark negara tetangga, serta seluruh wakil pilar pensiun, antara lain TNP2K (Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan) sebagai wakil pilar 0, DJSN (Direktorat Sistem Jaminan Nasional) sebagai wakil pilar 1 dan 2, Asosiasi Dana Pensiun Indonesia dan Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan sebagai wakil pilar 3, serta praktisi financial advisor sebagai wakil pilar 4 (rekaman webinar dapat diakses di <https://www.youtube.com/watch?v=mQpRtCYadCk>).

Dalam webinar tersebut para wakil masing-masing pilar menyampaikan tanggapan, kendala, upaya serta support needed agar masing-masing pilar tersebut menjadi semakin kokoh untuk menjalankan fungsinya masing-masing dalam bangunan sistem pensiun. Namun yang tidak kalah penting adalah upaya kolaborasi agar pilar-pilar tersebut terintegrasi secara harmonis.

Saat ini juga sedang dilakukan drafting Rancangan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK), termasuk klaster Dana Pensiun. Berbagai unsur terkait secara rally dilibatkan dalam Focus Group Dis-

cussion yang diorkestrasi BKF Kemenkeu, antara lain tentang isu-isu strategis terkait sistem pensiun (isu portability, perpajakan, fitur pencairan dini, kemungkinan manajer investasi dapat menjual produk reksadana pensiun), grand design sistem pensiun, tata kelola investment, penjaminan pensiun, asumsi-asumsi aktuarial, penetapan long term market expectation, penetapan target imbal hasil dan penilaian kinerja investasi, dan topik terkait lainnya. Dengan adanya diskusi-diskusi tersebut, UU ini diharapkan bisa menjawab tantangan dan menjadi katalis bagi transformasi dan reformasi sistem pensiun di Indonesia

Mumpung saat ini Indonesia sedang memiliki demographic bonus yang menurut Badan Pusat Statistik puncaknya berada di tahun ini karena jumlah penduduk usia bekerja mencapai 71% dari total populasi dan tingkat kelahiran yang cenderung turun, maka momentum ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya agar kelak tidak akan menjadi demographic curse yang membebani negara.

Mengutip kalimat William F. Sharpe bahwa masalah pensiun adalah masalah yang paling pelik karena bersifat multi dimensional (dan juga lintas generasi), maka diperlukan komitmen dan kolaborasi dari seluruh pihak terkait agar sistem pensiun dan implementasi dari sistem tersebut dapat kita tingkatkan secara terintegrasi baik dari aspek kecukupan, keberlanjutan maupun integritas.

“You may say I’m a dreamer but I am not the only one. Saya ingin menegaskan, bahwa itu semua bukanlah impian. Anda dan saya dapat mewujudkannya”, demikian pesan Direktur Jenderal Anggaran, Isa Rachmatarwata dalam penutup key note speech pension webinar yang lalu.

^{*)} Versi lain tulisan ini juga sudah dimuat di media lain, dan disiapkan untuk kegiatan advokasi CFA Society Indonesia

Akses publikasi:

<https://www.asean.mercer.com/newsroom/global-pension-index-2021-indonesia-ranked-sixth-among-asian-retirement-income-systems.html>

<https://www.mercer.com/our-thinking/global-pension-index-2021.html>

DAPEN TELKOM PEROLEH SERTIFIKAT SMAP



Herna Gunawan,
Senior Manager, Dapen Telkom

Jumat, 03 Desember 2021 Dapen Telkom berhasil memperoleh **Sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyipuan [SMAP] ISO 37001:2016** dan berhasil mempertahankan Sistem Manajemen Mutu [SMM] ISO 9001:2015 [renewal] yang diintegrasikan dalam implementasinya.

Sebagai informasi bahwa Dana Pensiun Telkom merupakan Dana Pensiun yang peratma kalinya menerapkan dan mendapatkan sertifikasi integrasi Sistem Manajemen Anti Penyipuan (SMAP) ISO 37001:2016 dan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015. Dana Pensiun Telkom telah mengelola bisnisnya dengan manajemen mutu sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan dan dipersyaratkan dan telah melaksanakan praktek-praktek terbaik sesuai dengan tatakelola dalam upaya meningkatkan program kepatuhan dan kesadaran untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mendeteksi adanya indikasi penipuan.



MENINGKATKAN KINERJA DANA PENSIUN DENGAN SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2015

Dibalik peran ISO 9001:2015 sebagai standar manajemen mutu, juga berperan sebagai alat ukur keberhasilan pada lingkungan bisnis organisasi. Manfaat dari penerapan ISO 9001:2015 jauh melampaui sebatas manajemen mutu, dimana dapat membantu organisasi untuk meningkatkan kinerja, mengurangi biaya rantai pasokan, mempertahankan kualitas pelayanan kepada pelanggan (peserta) dan senantiasa berupaya dalam perbaikan berkelanjutan. Organisasi akan selalu menemukan bahwa hampir selalu ada ruang untuk perbaikan. Seberapa besar ISO 9001:2015 ini dapat membantu organisasi untuk membuka ruang perbaikan, mari kita jabarkan dari beberapa hal:

- **Standardisasi proses:** ISO 9001:2015 dapat membantu organisasi dalam standarisasi proses, yang pada gilirannya dapat memberikan kesempatan untuk memeriksa bagaimana kita bekerja dan mendorong perbaikan. Penggunaan “pendekatan proses” juga dapat membantu mengintegrasikan proses dan menghilangkan limbah, serta memungkinkan organisasi dalam meningkatkan kinerjanya menggunakan berbagai metodologi umum.
- **Umpan balik pelanggan untuk meningkatkan sistem:** ISO 9001:2015 dapat membantu kita untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan / peserta. Hasil pengukuran Kepuasan Pelanggan memberikan kita umpan balik yang positif untuk kemajuan organisasi serta dapat membuktikan bahwa umpan balik pelanggan sangat membantu untuk

mendorong perbaikan dan meningkatkan kepuasan pelanggan, dan membantu kita mendorong kebiasaan komunikasi berkelanjutan.

- **Mengembangkan proses tindakan korektif yang kuat:** Dalam hal terjadi kekurangan/korektif, ISO 9001:2015 membantu kita melengkapi diri dengan proses yang benar untuk menyelidiki akar penyebab, menghilangkan, dan memastikannya tidak akan terulang lagi. Dalam hal terdapat ketidakpuasan pelanggan, tindakan korektif yang efektif dapat menjadi penting untuk kinerja pelayanan kepada pelanggan.
- **Mengembangkan proses review dan pengukuran:** pengukuran yang akurat dan review merupakan elemen kunci dari standar ISO 9001:2015. Menggunakan indikator kinerja utama yang ditetapkan oleh pemangku kepentingan yang relevan dan dengan masukan manajemen puncak dapat memungkinkan sasaran mutu organisasi akan diukur secara akurat, periodik dan memberikan landasan faktual untuk inisiatif perbaikan.
- **Manajemen risiko:** Ini adalah bagian penting dari standar ISO 9001:2015 dan proses manajemen risiko yang efektif dapat memberikan landasan terbaik untuk organisasi dalam membuat keputusan berdasarkan risiko yang mempengaruhi pasar.
- **Mendorong budaya perbaikan terus-menerus:** Perbaikan terus-menerus mendasari seluruh ISO 9001:2015, dan dalam hal ini seperti mengembangkan hubungan dengan pelanggan, meningkatkan proses yang ada, atau mengembangkan yang baru, perbaikan terus-menerus dapat meningkatkan kinerja penjualan.
- **Meningkatkan kualifikasi organisasi:** Sertifikasi ISO 9001:2015 memberikan gambaran tingkat pengelolaan organisasi yang baik dan memberikan peluang kepercayaan tinggi secara reputasi dimata stakeholder.

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN ISO 37001:2016

Menteri BUMN Erick Thohir blak-blakan dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Kamis (2/12) bahwa “terlalu banyak dana pensiun jadi tempat korupsi yang akhirnya tagihan-tagihannya tidak terbayarkan”. Beliau berencana mengusulkan isu-isu Dana Pensiun masuk dalam sistem perundang-undangan tentang keuangan. Usulan itu bakal disampaikan pada tahun 2022 agar dana pensiun tak lagi menjadi sarang tindak rasuah.

Salah satu jenis korupsi adalah pemberian-pemberian dari satu pihak ke pihak lainnya. Pemberian-pemberian ini dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu (1) penyuapan, (2) gratifikasi, dan (3) pemerasan.

Penyuapan adalah bentuk pemberian yang dilakukan oleh korporasi atau pihak swasta berupa pemberian barang, uang, janji, dan bentuk lainnya yang bertujuan memengaruhi pengambilan keputusan dari pihak penerima suap. Suap disertai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Tindakan suap, baik yang dilakukan di dalam atau pun luar negeri, pada jam kerja atau pun di luar jam kerja, akan dipidana.

Di sisi lain, gratifikasi adalah segala bentuk pemberian, baik bernilai besar atau pun kecil. Gratifikasi dan uang suap umumnya sama-sama diinisiasi oleh pemberi. Akan tetapi, perbedaan mendasar antara kedua hal tersebut adalah tindakan gratifikasi tidak bersifat transaksional. Apabila tindakan suap dilakukan untuk memengaruhi keputusan penerima, gratifikasi dilakukan sebagai upaya “mencari perhatian” kepada pejabat dengan tujuan memengaruhi kebijakan dalam jangka panjang. Sebagian ahli bahkan berpendapat bahwa gratifikasi merupakan suap yang tertunda.

Sementara pemerasan adalah tindakan menyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya. Namun demikian, unsur “memaksa” menjadi sangat penting untuk dibuktikan pada tindakan pidana ini karena sering dijadikan alasan bagi pihak pemberi sebagai dalih pemberian. Perbedaan mendasar antara penyuapan dan pemerasan adalah dari segi inisiator serta unsur pemaksaan antara pemberi dan penerima.

Peraturan terkait korupsi sektor korporasi sebagai pelaku tindak pidana diatur dalam UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada UU No.20 tahun 2001 pasal 20 ayat 2, dinyatakan bahwa tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

Salah satu sistem manajemen yang bisa diterapkan dalam upaya antikorupsi mulai dari mengidentifikasi, mencegah, dan mendeteksi adanya indikasi penyuapan yaitu dengan sistem

manajemen anti suap. Dimana system ini dapat diterapkan oleh organisasi dan disertifikasi oleh ISO 37001:2016. ISO 37001:2016. Sistem manajemen ini diterbitkan pada 15 Oktober 2016 untuk membantu organisasi mencegah, melaporkan, maupun menyelesaikan kasus penyuapan. Sistem ini dirancang untuk menumbuhkan budaya antisuap pada suatu organisasi dan meningkatkan peluang untuk mendeteksi upaya-upaya insiden penyuapan dari awal. Sistem manajemen ini bersifat fleksibel sehingga dapat diterapkan pada berbagai jenis organisasi, perusahaan, lembaga, ataupun institusi.

Penerapan ISO 37001:2016 akan membantu organisasi dalam meningkatkan pengendalian terhadap salah satu tindakan korupsi. Implementasi sistem ini juga memberikan kepercayaan terhadap seluruh pihak berkepentingan organisasi, baik manajemen, pemilik, pelanggan, dan rekan bisnis, bahwa organisasi telah melaksanakan praktik pengendalian antisuap yang baik dan telah diakui secara internasional. Apabila suatu saat terjadi penyelidikan kasus penyuapan dalam organisasi, penerapan sistem ini

juga akan memberikan bukti kepada jaksa maupun pengadilan bahwa organisasi telah mengambil langkah-langkah dalam upaya pencegahan penyuapan.

ADPI sangat apresiatif dan berterima kasih kepada Dapen Pensiun Telkom yang telah melengkapi Tata Kelola Dana Pensiun Yang Baik. Dengan mengintegrasikan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015 dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016, hal ini menunjukkan bahwa disamping penerapan tata kelola dana pensiun yang baik sebagaimana

diatur oleh OJK, Dana Pensiun Telkom juga sebagai pioneer dalam menerapkan standar mutu dan compliance sehingga dapat membuktikan pada khalayak umum bahwa Dana Pensiun selalu dikelola dengan baik dan bukan tempatnya korupsi.

Apresiasi juga datang dari OJK yang disampaikan oleh Ibu Sesriwati selaku Deputy Direktur Pengawasan Dana Pensiun Iuran Pasti & BPJS Ketenagakerjaan, bahwa OJK menghimbau kepada lembaga jasa keuangan Non Bank untuk secara aktif dapat mengimplementasikan dan mendapatkan sertifikasi SMAP ini khususnya bagi yang memiliki aset diatas 1 Triliun, mengingat pengelolaan jasa keuangan termasuk industri Dana Pensiun merupakan salah satu industri yang cukup rawan dan berisiko kalau dikaitkan dengan potensi Fraud. Dengan diterimanya Sertifikasi SMAP oleh Dana Pensiun Telkom merupakan salah satu langkah maju bagi industri Dana Pensiun di Indonesia, dimana Dana Pensiun Telkom menjadi pioneer khususnya di Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.

Sertifikasi ini merupakan salah satu bentuk usaha dan komitmen dari Pengurus dan seluruh Pegawai Dana Pensiun Telkom untuk senantiasa menerapkan dan menjaga kualitas pengelolaan dana pensiun dan menjaga agar tindakan fraud bisa terhindarkan dengan menerapkan sistem anti penyuapan embeded dalam proses bisnis saat ini. Semoga menjadi inspirasi buat pengelolaan Dana Pensiun yang lainnya. □



REFRESHMENT & MUNAS 2 TAHUN 2021



Bertempat di Hotel Discovery Kartika Plaza Denpasar, tanggal 18 November 2021 telah dilaksanakan Musyawarah Nasional 2 tahun 2021 ADPI. Pemilihan Denpasar sebagai lokasi Munas dilandasi dengan pertimbangan bahwa Bali merupakan daerah yang sudah relatif “aman” dengan level 2, disisi lain insan Dana Pensiun juga sudah merasa ingin bersilaturahmi dengan sesama mitra Dana Pensiun, sehingga suasana benar-benar mencerminkan kekeluargaan. Semua KOMDA ADPI terwakili, mulai dari KOMDA I diujung utara Sumatera sampai KOMDA 8 di bagian timur Nusantara.

Setelah pemaparan rencana kegiatan dan anggaran tahun 2022 yang dibawakan oleh Pak Sularno selaku Sekretaris ADPI, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan oleh seluruh peserta. KOMDA 1 sampai dengan KOMDA 8 seluruhnya secara aklamasi menyatakan setuju dengan rencana kedepan ADPI.

Acara dilanjutkan dengan penunjukan pejabat baru sebagai pengganti antar waktu, yaitu Pak Budiarto dari Dapen Bank Indonesia sebagai Ketua Bidang Advokasi dan Mediasi, Pak Budi Sulisty dari Dapen Jasa Rahaja sebagai Ketua Bidang Data Base, Informasi dan Litbang serta Pak Asmorohadi dari Dapen BNI sebagai Anggota. Selamat bekerja kepada pengurus baru, semoga ADPI semakin jaya, aamiin.



Ki-ka: Pak Budi Sulisty, Pak Asmorohadi, dan Pak Budiarto

ADPI PINDAH KANTOR >>



Ponggawa ADPI berfoto bersama di Lt. 16 Menara Taspen, kenangan hampir 2 dasawarsa menghuni lokasi.

Akhir tahun 2021, ADPI yang selama ini berkantor di Menara Taspen jalan Jend. Sudirman kav. 2 Jakarta Pusat, akan bo-yong ke lokasi baru, karena Menara Taspen yang selama ini menjadi markas ADPI sejak tahun 2003, harus dikosongkan karena akan dibangun gedung baru yang megah. Setelah melakukan observasi, akhirnya diperoleh lokasi yang baru, yang kebetulan tidak jauh dari lokasi yang lama, yaitu di Wisma BNI 46. Berada di lantai 3, lokasi baru bisa menggunakan fasilitas ruang pelatihan yang cukup representatif. Direncanakan minggu ke-3 Desember 2021, ADPI sudah akan menempati lokasi baru, mari disambangi....

REFRESHMENT SERTIFIKASI MUDP DAN MRDP

Dihari dan tempat yang sama, Kamis 25 November 2021 Hotel Discovery Kartika Plaza Legian Bali, diselenggarakan acara webinar dan secara offline Refreshment untuk MUDP dan MRDP. Seperti diketahui, sertifikasi MRDP yang diakui oleh BNSP berlaku untuk 3 tahun dan dapat diperpanjang dengan melalui proses tertentu, yaitu mengikuti refreshment dan selanjutnya mengajukan permohonan perpanjangan sertifikat ke LSPDP. Acara Refreshment yang diikuti oleh 104 peserta secara offline dan 461 secara online, menampilkan narasumber Pak Suheri dan Pak Sularno, masing-masing sebagai Ketua ADPI dan Sekretaris ADPI dengan paparan terkait dengan Tata Kelola Dana Pensiun dan Akuntansi Dana Pensiun. Pak Suheri secara gamblang menjelaskan tugas pokok stakeholders Dana Pensiun, terutama Pengurus dan Pengawas. Pak Sularno mengulas antara lain bagaimana seharusnya kompetensi Pengurus Dana Pensiun, bagaimana menyusun strategi bisnis, mengelola investasi serta menerapkan manajemen risiko. Sebagai penutup Pak Arif dari LSPDP menyampaikan bagaimana tatacara perpanjangan Sertifikasi Manajemen Risiko Dana Pensiun bagi mereka yang sertifikatnya sudah mencapai 3 tahun. Ada sekitar 350 pemegang Sertifikat Manajemen Risiko Dana Pensiun yang perlu diperpanjang tahun ini, dan refreshment ini merupakan salah satu syarat untuk pengajuan perpanjangan kepada LSPDP, sesuai persyaratan dari BNSP.



PARTISIPASI DANA PENSIUN DI HUT KE-11 OJK DALAM GAMBAR





ADPI

*Kami
Pindah
Kantor!*

EFEKTIF **13** DESEMBER 2021

ASOSIASI DANA PENSIUN
INDONESIA [ADPI]

&

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
DANA PENSIUN [LSPDP]

<< **MENEMPATI KANTOR BARU** >>

Wisma 46 - Kota BNI

Lantai 3 - Suite 3.05
Jl Jend. Sudirman Kav. 1
Jakarta 10220

[ADPI] Tlp: [021] 2514761, 2514762 - Fax: [021] 2514760

[LSPDP] Tlp: [021] 2514763

